



**PENGADILAN TINGGI  
TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

# LAPORAN KINERJA *Tahun 2023*



☎ 021-31966163

🌐 [pttun.jakarta.go.id](http://pttun.jakarta.go.id)

📍 Jl. Cikini Raya No. 117 Menteng Jakarta Pusat

📷 [pttun.jakarta.117](https://www.instagram.com/pttun.jakarta.117)

✉ [pttun.jakarta@gmail.com](mailto:pttun.jakarta@gmail.com)



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini, Kecamatan Menteng  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330. [www.pttun-jakarta.go.id](http://www.pttun-jakarta.go.id)

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
ATAS LAPORAN KINERJA PENGADILAN TINGGI  
TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 17 Januari 2024

Ketua



H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.  
NIP. 19580610 198503 1 001

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan salah satu media komunikasi untuk menyampaikan informasi kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada tahun 2023 akan suatu lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel dapat terwujud.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

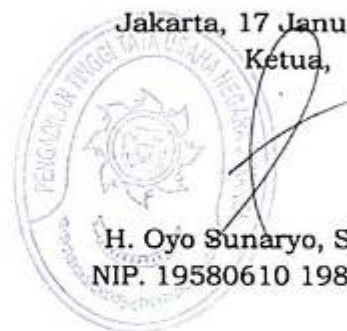
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membuat LKjIP ini untuk menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah dilakukan selama tahun 2023. Capaian kinerja diperoleh dari perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

LKjIP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2023 ini berisi tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, dan analisis akuntabilitas keuangan selama tahun 2023.

Akhir kata kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang akan datang.

Jakarta, 17 Januari 2024

Ketua,



H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.  
NIP. 19580610 198503 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi .....	11
C. Struktur Organisasi .....	14
D. Isu Strategis.....	19
E. Sistematika Laporan .....	21
BAB II PERENCANAN KINERJA.....	23
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024 .....	23
B. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	31
C. Perjanjian Kinerja .....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	34
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	34
1. Analisis Capaian Kinerja.....	36
2. Capaian Kinerja Lainnya.....	52
3. Perbandingan Capaian Kinerja Di Level Nasional (Antar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Dan Mahkamah Agung).....	62
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.....	66
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	77
6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....	79
B. Realisasi Anggaran.....	88
BAB IV PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran .....	103

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Ringkasan Eksekutif Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023 .....	1
Tabel 2 - Reviu Tujuan dan Indikator Tujuan Utama.....	25
Tabel 3 - Reviu Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	26
Tabel 4 - Tujuan dan Indikator Kinerja Tambahan .....	26
Tabel 5 - Kinerja dan Indikator Kinerja Tambahan .....	27
Tabel 6 - Reviu Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.....	31
Tabel 7 - Reviu Rencana Kinerja (tambahan) Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta .....	32
Tabel 8 - Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	33
Tabel 9 - Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023 .....	35
Tabel 10 - Capaian Kinerja Lainnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023 .....	35
Tabel 11 - Persentase Penyelesaian Perkara Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 .....	37
Tabel 12 - Persentase Penyelesaian Perkara Gugatan Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 .....	37
Tabel 13 - Capaian Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 .....	38
Tabel 14 - Perbandingan Capaian Persentase Perkara Banding Dan Perkara Gugatan Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 – 2023 .....	39
Tabel 15 - Sasaran I. Capaian IKU 1 Dalam Renstra PT TUN Jakarta 2020-2024	40
Tabel 16 - Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023..	41
Tabel 17 - Capaian Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023 .....	42
Tabel 18 - Perbandingan Capaian Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 - 2023 .....	42
Tabel 19 - Sasaran I. Capaian IKU 2 Dalam Renstra PT TUN Jakarta 2020-2024	43
Tabel 20 - Capaian Indeks Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2023.....	45
Tabel 21 - Pemantauan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat .....	46
Tabel 22 - Perbandingan Indeks Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020 - 2023 .....	47

Tabel 23 - Sasaran I. Capaian IKU 3 Dalam Renstra PT TUN Jakarta 2020-2024	48
Tabel 24 - Persentase Salinan Putusan Perkara Banding Yang Dikirim Kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023 .....	49
Tabel 25 - Persentase Salinan Putusan Perkara Gugatan Yang Dikirim Kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023 .....	50
Tabel 26 - Capaian Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023.....	50
Tabel 27 - Perbandingan Capaian Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2020 - 2023.....	51
Tabel 28 - Sasaran II. Capaian IKU 1 Dalam Renstra PT TUN Jakarta 2020-2024 .....	52
Tabel 29 - Capaian Persentase SDM Teknis Yang Mempunyai Kemampuan Di bidang Teknis Yudisial Tahun 2023 .....	53
Tabel 30 - Kegiatan Pelatihan, FGD, KK, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Untuk SDM Tenaga Teknis Yudisial.....	54
Tabel 31 - Capaian Persentase SDM Non Teknis Peradilan Yang Mengikuti Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Tahun 2023 .....	56
Tabel 32 - Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Untuk SDM Non Teknis .....	56
Tabel 33 - Capaian Persentase Pengaduan Yang Dapat Ditindaklanjuti Tahun 2023 .....	58
Tabel 34 - Perbandingan Capaian Persentase Pengaduan Yang Dapat Ditindaklanjuti Tahun 2020 - 2023 .....	58
Tabel 35 - Persentase Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasikan Tahun 2023 .....	59
Tabel 36 - Perbandingan Capaian Persentase Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasikan Tahun 2020 - 2023.....	59
Tabel 37 - Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) Tahun 2023 .....	61
Tabel 38 - Perbandingan Capaian Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) Tahun 2022 - 2023.....	62
Tabel 39 - Perbandingan Capaian Kinerja PT TUN Jakarta dengan PT TUN Surabaya, PT TUN Makassar, dan Mahkamah Agung Tahun 2022 .....	63
Tabel 40- Perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2023.....	64
Tabel 41 - Perbandingan Realisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Target Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2023 .....	65
Tabel 42 - Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi .....	66

Tabel 43 - Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 01 Capaian Fisik dengan Capaian Keuangan.....	80
Tabel 44- Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Capaian Fisik dengan Capaian Keuangan .....	81
Tabel 45 - Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 05 Capaian Fisik dengan Capaian Keuangan.....	82
Tabel 46 - Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023.....	88
Tabel 47- Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2023 .	89
Tabel 48 - Efisiensi Anggaran pada masing-masing Sasaran Strategis.....	89
Tabel 49 - Realisasi DIPA 01 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023 .....	91
Tabel 50 - Realisasi DIPA 05 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023 .....	91
Tabel 51 - Realisasi DIPA 01 mendukung Sasaran I, III, IV, V, VI dan 7 Indikator .....	93
Tabel 52 - Realisasi DIPA 01 mendukung Sasaran I dan 1 Indikator .....	93
Tabel 53 - Realisasi DIPA 05 mendukung Sasaran II, III, dan V dan 4 Indikator..	94
Tabel 54 - Realisasi Dan Presentase DIPA 01 Dan DIPA 05.....	95
Tabel 55 - Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Per Program untuk DIPA 01 dan DIPA 05 Tahun 2020-2023.....	101

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Pohon Kinerja .....	5
Gambar 2 - SKP Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.....	11
Gambar 3 - Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta .....	13
Gambar 4 -Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta .....	16
Gambar 5 - Inovasi Indoput.....	21
Gambar 6 - Framework Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.....	31
Gambar 7 -Pengukuran Efisiensi Anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023 .....	78

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 - Persentase Perkara Banding dan Perkara Gugatan Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 s.d. 2023.....	39
Grafik 2 - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 s.d. 2023.....	43
Grafik 3 - Indeks Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020 - 2023 .....	47
Grafik 4 - Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2020- 2023 .....	51

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Reviu Ke-2 Renstra Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 2020-2024, mempunyai visi “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung” dan mempunyai empat misi yaitu: (1) Meningkatkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan (yusticia balance), (2) Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Tata Usaha Negara, (3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara. (4) Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Reviu Ke-2 Renstra Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga memuat 2 (dua) Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024, yaitu (1) Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, (2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyajikan informasi terkait capaian kinerja tahun 2023 dalam upaya mewujudkan visi dan misi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sehingga Laporan Kinerja ini merupakan media untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pelaksanaan mandat dan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran. Hasil pengukuran kinerja, menunjukkan bahwa skor kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023 mencapai **106,08%** dinyatakan “Berhasil”, karena pada dua sasaran strategis berhasil memenuhi rata-rata capaian  $\geq 100\%$ .

*Tabel 1 - Ringkasan Eksekutif Capaian Kinerja  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023*

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.		1. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	100%	111,11%
		2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	35%	36,36%	103,90%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	3. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80	97,19	121,49%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I</b>					<b>112,17%</b>
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis II</b>					<b>100%</b>
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Startegis I dan II</b>					<b>106,08%</b>

Untuk meningkatkan capaian-capaian target kinerja di periode mendatang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan teknologi informasi pada seluruh kegiatan dan meningkatkan efektivitas pemantauan tindak lanjut.
2. Mendorong pelaksanaan pengawasan yang lebih berkualitas serta mampu memberikan manfaat kepada *stakeholder* dengan menjalin komunikasi yang baik dan harmonis dengan para pemangku kepentingan.
3. Melakukan pembinaan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan peradilan diwilayah hukumnya.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja melalui aplikasi *E-SAKIP* Komdanas, monitoring Bappenas PP 39, monitoring SMART.
5. Monitoring dan evaluasi kinerja melalui rapat bulanan pada semua bagian organisasi, untuk melihat sejauh mana capaian tersebut dan apakah perlu dilakukan reviu terhadap capaian tersebut.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Evaluasi dan Pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang secara teknis berpedoman pada:

1. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah;
2. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
7. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) T.A. 2023 Nomor 2124/SEK/OT.01.1/09/2022 tentang Ralat Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) TA 2023;
8. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 1322/KPT.TUN/W2-TUN/KP3.4.1/XII/2023, tanggal 20 Desember 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
9. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 1222/KPT.TUN/W2-TUN/KP3.4.1/XII/2023, tanggal 13 Desember 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu dan Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

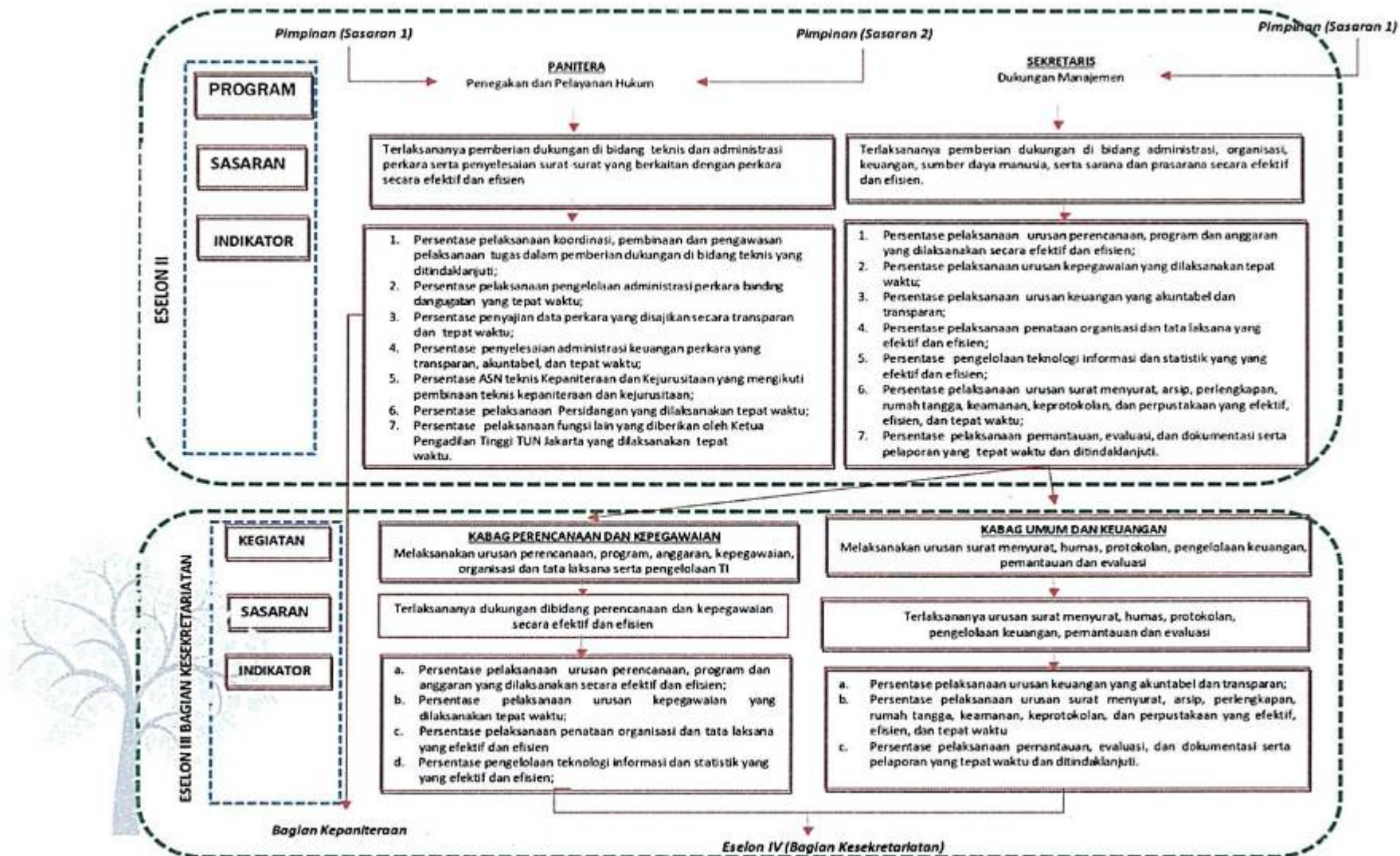
Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2023 mengacu pada Reviu Ke-2 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2020-2024 pada tanggal 20 Desember 2023.

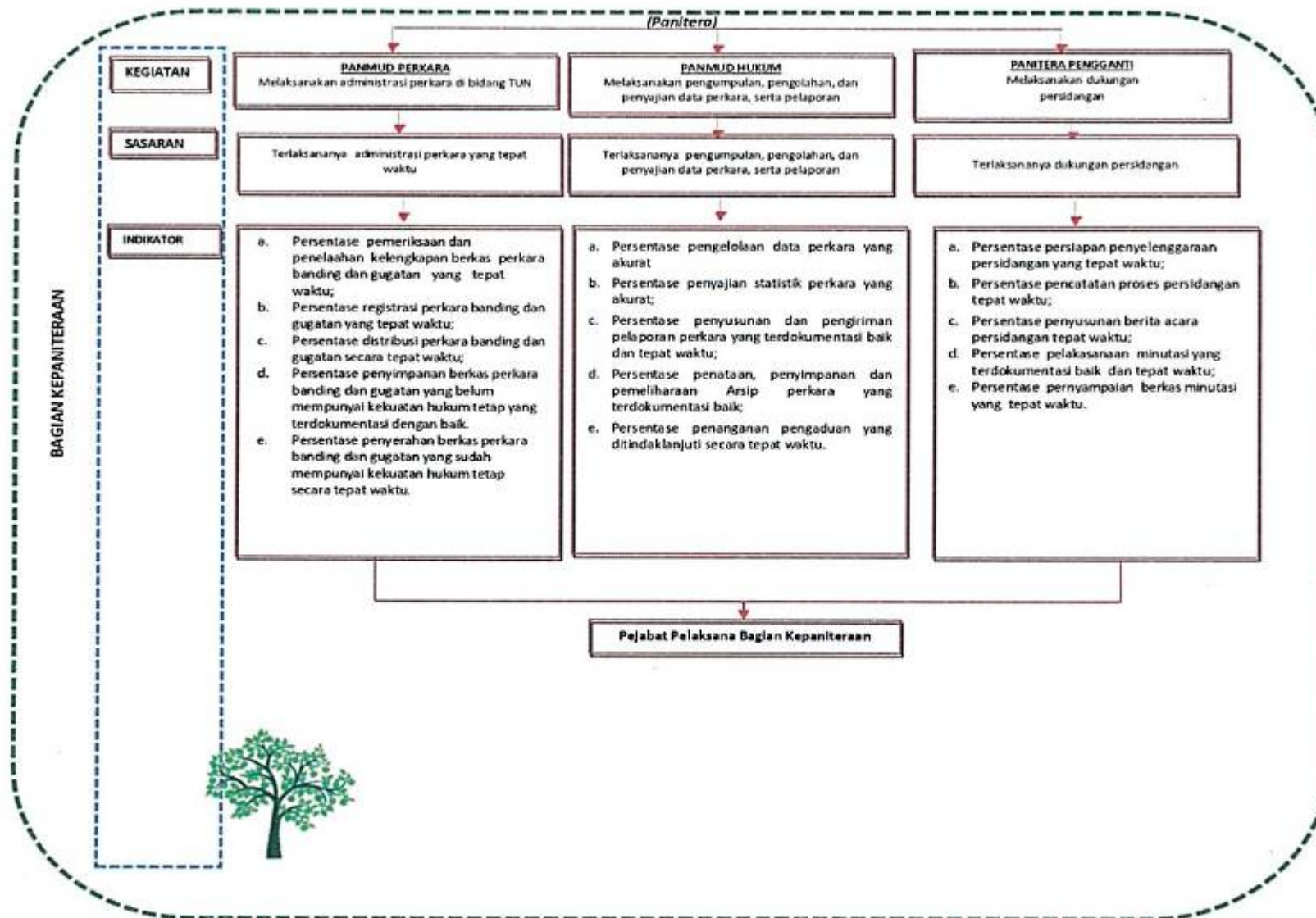
Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023 ini merupakan laporan yang menggambarkan capaian kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang telah dilakukan reviu pertama pada tanggal 24 Februari 2023 dan reviu kedua pada tanggal 20 Desember 2023 dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tahun 2023.

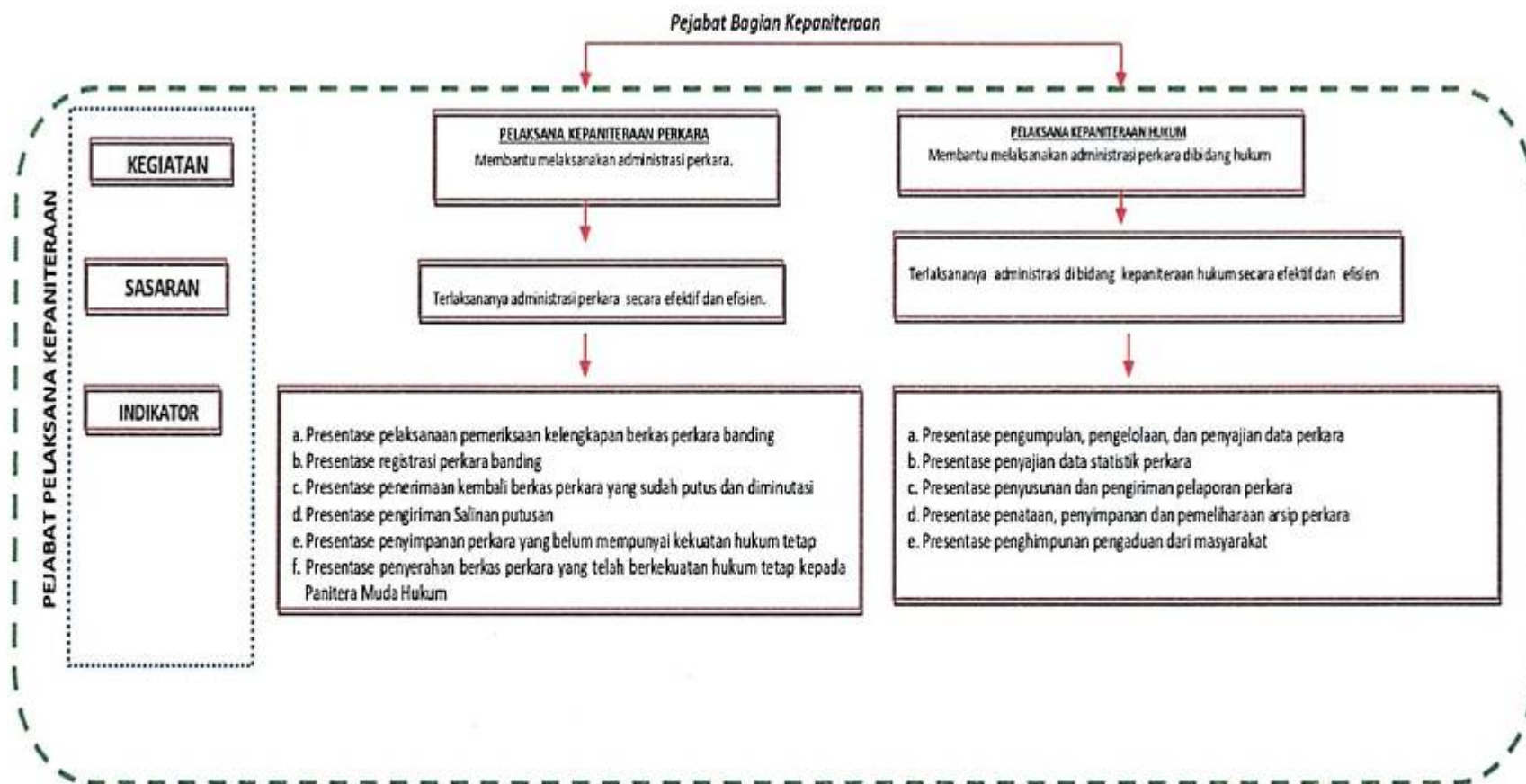
Dalam Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2023 ini diuraikan mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, dan realisasi anggaran tahun 2023.

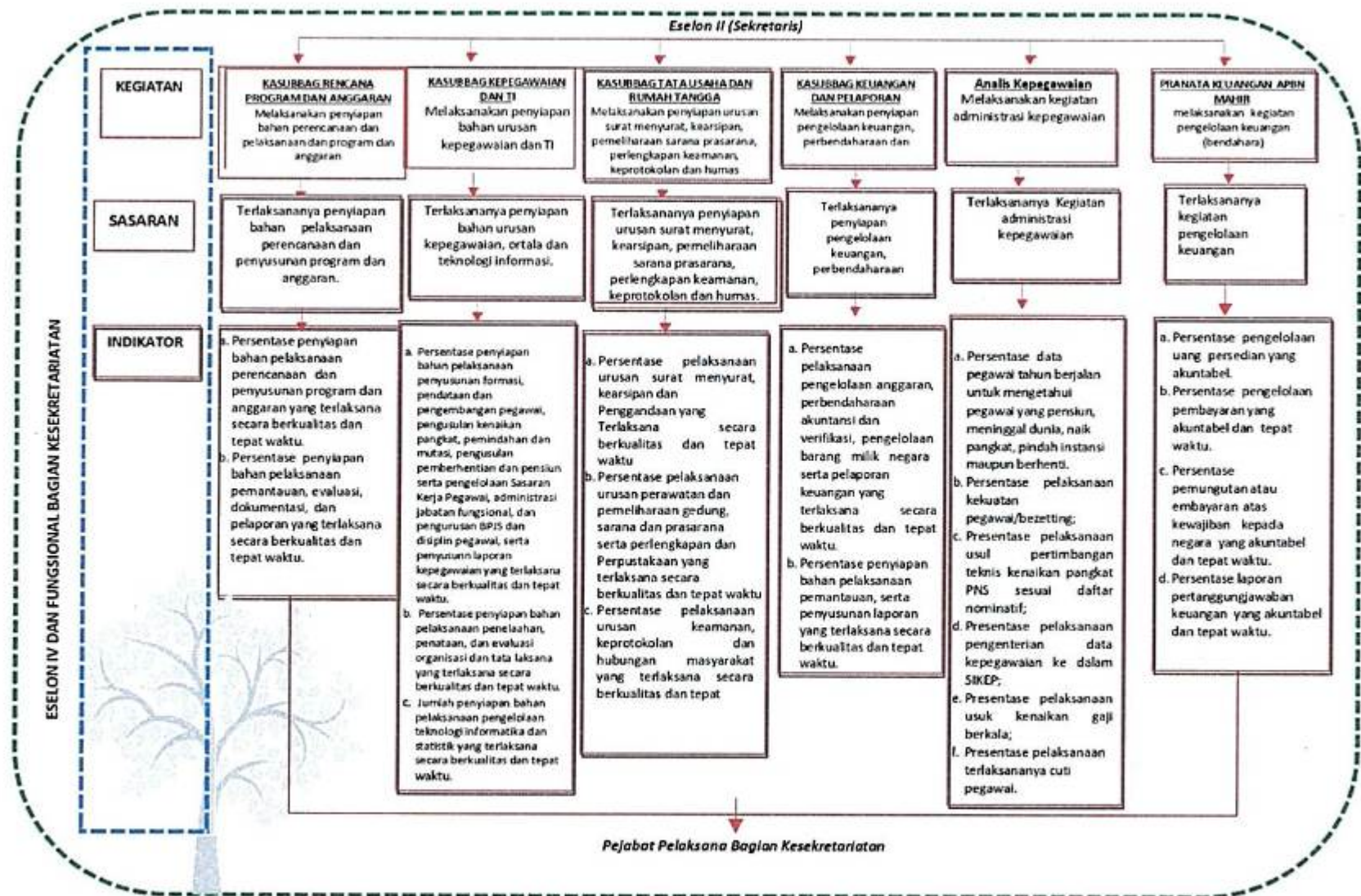
Perjenjangan kinerja yang dituangkan dalam Pohon Kinerja yang dimiliki Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mampu menggambarkan perencanaan kinerja secara SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time-Bound Goals*), sehingga mempermudah dalam melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja serta mempermudah penyusunan laporan kinerja.





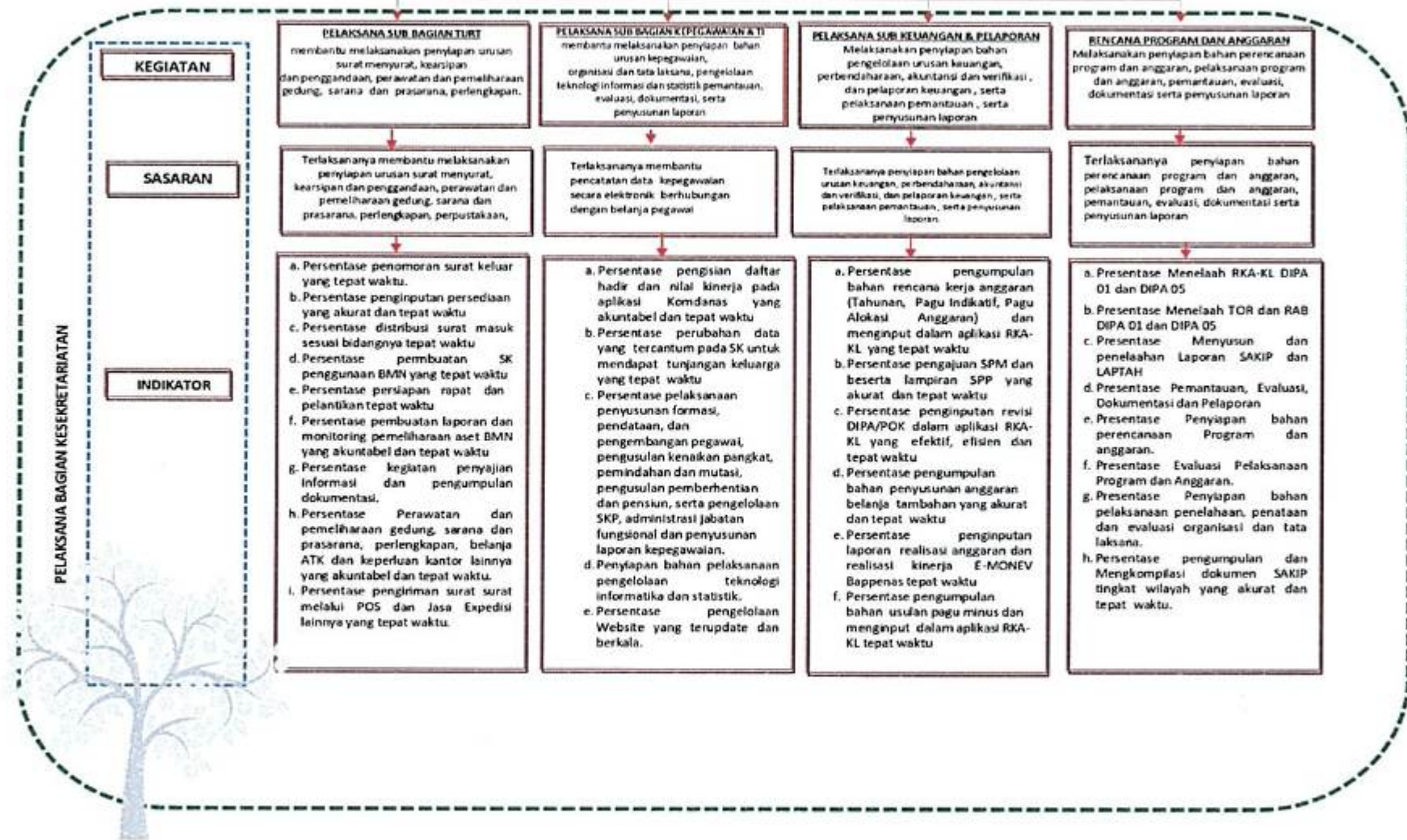






ESELON IV DAN FUNGSIONAL BAGIAN KESekretariatan

Pejabat Eselon 4 (Bagian Kesekretariatan)



Pohon kinerja diatas juga dijadikan acuan dalam penyusunan SKP (sasaran kerja pegawai), E-Kinerja dan PKP (penetapan kinerja pegawai) semua level unit organisasi (berjenjang) atau secara *cascading*.

The screenshot displays the 'SASARAN KINERJA PEGAWAI' (Employee Performance Targets) system. It features a navigation menu on the left with options like 'Home', 'Kategori', 'A. TUN', 'B. TUN', 'C. TUN', 'D. TUN', and 'E. TUN'. The main content area shows a table with columns for 'No', 'REKORSA HASIL KERJA', 'SEKORSA HASIL KERJA', 'TARUHT', and 'REKORSA'. The table contains several rows of data, including performance indicators and their corresponding targets. A sidebar on the right contains a blue box with text, likely providing additional information or instructions.

Gambar 2 - SKP Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

## B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

### 1. Kedudukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta dan *voortpost* (kawal depan) Mahkamah Agung RI melaksanakan visi untuk turut serta mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diharapkan mampu memberikan kontribusi guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI ke depan, terutama dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa TUN, Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diresmikan pada tanggal 10 November 1990 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Pengadilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding, awal terbentuknya, membawahi 8 (delapan) wilayah propinsi yang menjadi yuridiksinya yaitu:

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 1. DKI Jakarta      | 5. Kalimantan Selatan |
| 2. Jawa Barat       | 6. Kalimantan Barat   |
| 3. Banten           | 7. Kalimantan Utara   |
| 4. Kalimantan Timur | 8. Kalimantan Tengah  |

Dari delapan propinsi tersebut masih ada satu propinsi yang belum dibentuk yaitu propinsi Kalimantan Utara sehingga sengketa yang timbul di propinsi tersebut masih dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

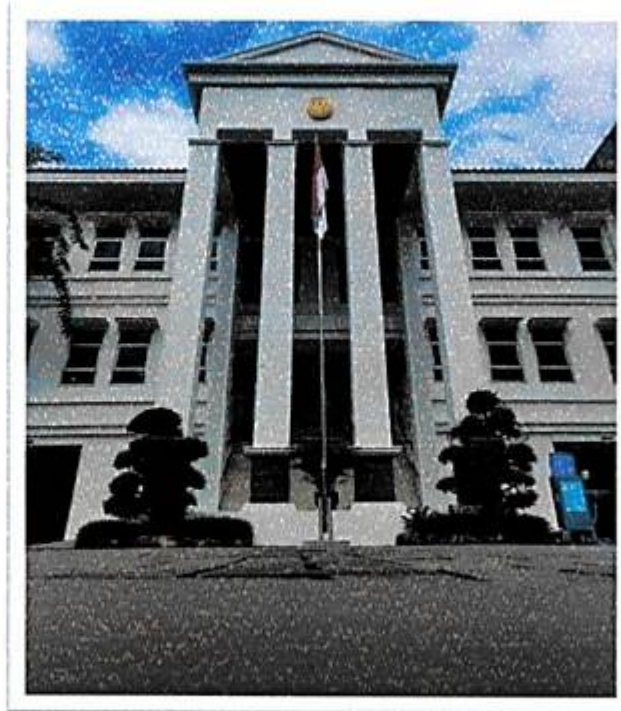
Kemudian pada akhir tahun 2022, yurisdiksi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengalami perubahan untuk pengadilan tingkat pertamanya, ini karena di wilayah Kalimantan Selatan dibentuk Pengadilan tingkat banding yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 yaitu Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Banjarmasin. Wilayah Pengadilan tingkat pertama yang mengalami pergantian tingkat bandingnya adalah:

1. Pengadilan Tata usaha Negara Banjarmasin;
2. Pengadilan Tata usaha Negara Pontianak;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

Ke 4 (empat) Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, kini dibawah koordinasi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin. Sehingga dengan adanya perubahan tersebut, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta meliputi 3 (tiga) pengadilan tata usaha negara yang terdiri dari:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung; dan
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Sebagai instansi pemerintah, menurut Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyusun Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Tahun 2023.



Gambar 3 - Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

2. Wewenang dan Fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
  - a. Wewenang

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai lembaga peradilan (yudikatif) yang membawahi 3 (tiga) satuan kerja yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *jo.* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Di samping itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan:

- 1) Sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya, dalam hal ini pengadilan Tinggi Tata usaha Negara bertindak sebagai tingkat pertama;

- 2) Sengketa yang telah melalui upaya administratif, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan Tingkat pertama (Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

b. Fungsi

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tata usaha negara tingkat banding di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat, memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan di wilayah hukumnya,
- 2) Melakukan pembinaan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan peradilan di wilayah hukumnya;
- 3) Menyusun laporan hasil pengawasan, menyusun laporan perkara;
- 4) Menyusun statistik perkara serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari semua Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
- 5) Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;
- 6) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
- 7) Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan jurusita di daerah hukumnya;
- 8) Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- 9) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (tata usaha dan rumah tangga, keuangan dan pelaporan, kepegawaian dan IT, rencana program dan anggaran); dan
- 10) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum tata usaha negara, pelayanan riset/penelitian.

**C. Struktur Organisasi**

Berikut ini adalah struktur organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan:

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI mempunyai tugas pokok sebagaimana diamanatkan didalam pasal 50, 51, 51A, 52 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain:

- 1) Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
- 2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding;
- 3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya;
- 4) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
- 5) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
- 6) Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, dan Sekretaris di daerah hukumnya.
- 7) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya.

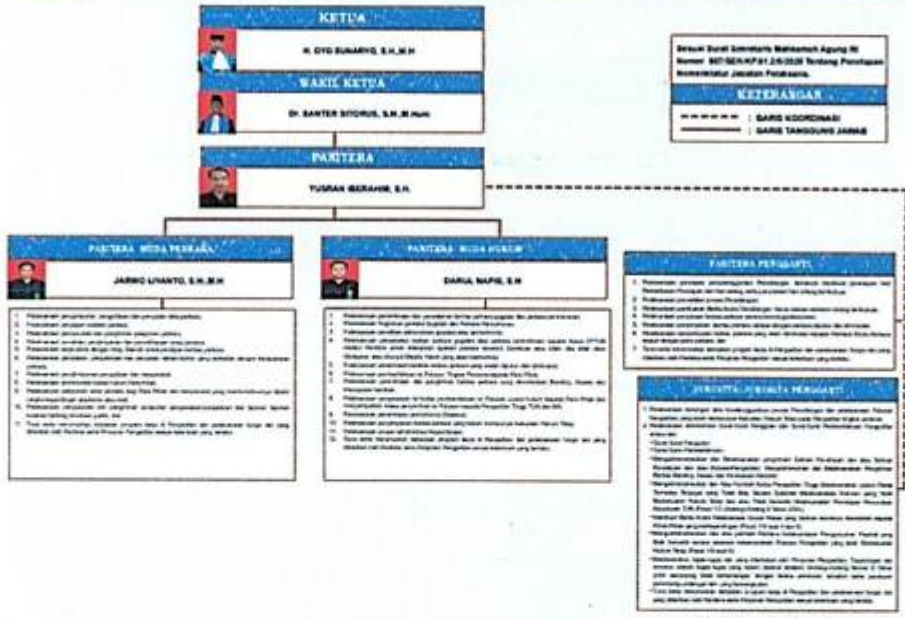


**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**



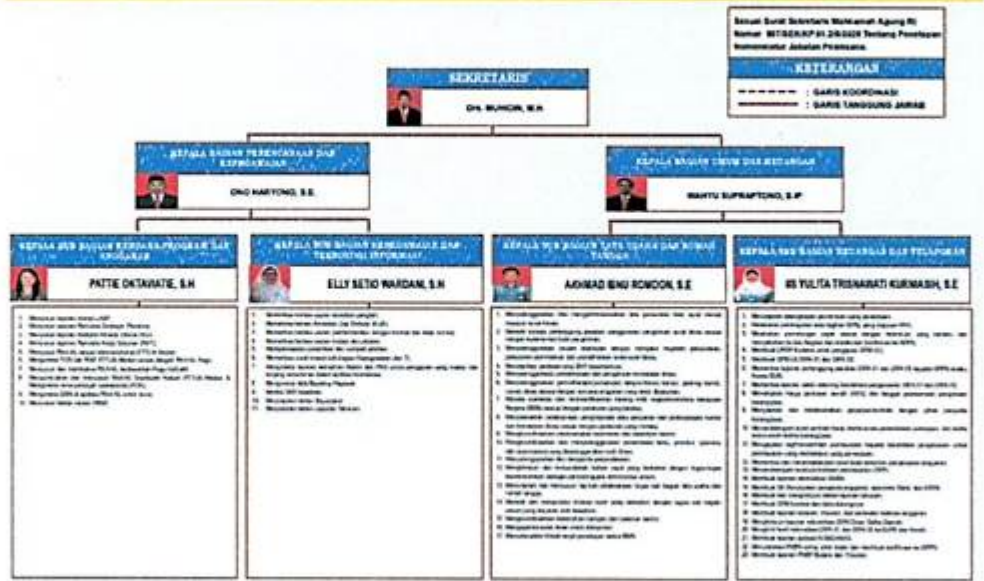
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**STRUKTUR ORGANISASI**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**



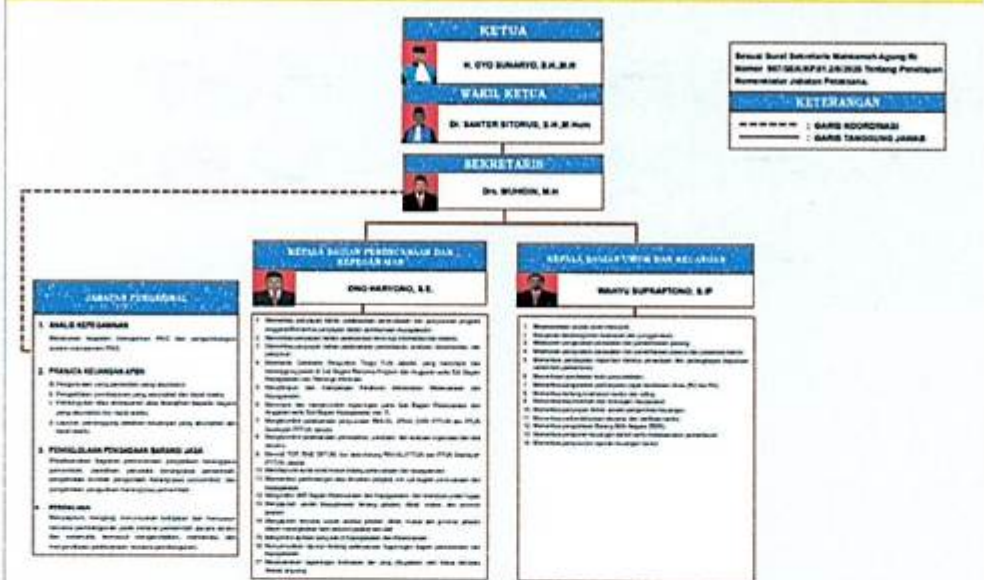
**STRUKTUR ORGANISASI**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**



**STRUKTUR ORGANISASI**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**



**STRUKTUR ORGANISASI**



#### D. Isu Strategis

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan sebagai kawal depan (Voorpost) di wilayah hukumnya yang mempunyai tugas menangani perkara, harus mampu memberikan pelayanan prima (*Excellent Service*) bagi pencari keadilan. Sebagai *porvoost* (kawal depan) Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa mengadili perkara (upaya hukum) yang bersumber dari Pengadilan Tata Usaha Negara di Wilayah Hukumnya.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding yang membawahi 3 (tiga) Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum DKI Jakarta dan Jakarta Barat memiliki peran yang sangat penting, mengingat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berlokasi di Pusat Ibukota Negara yang mana ruang lingkup perkara dan daerahnya lebih kompleks.

Terdapat dua isu strategis utama yang dihadapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selama tahun 2022, yakni sebagai berikut:

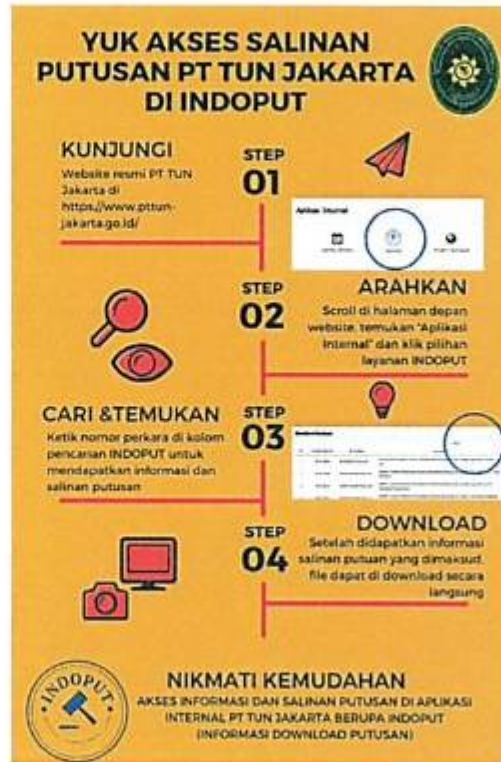
1. Pelaksanaan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Efektivitas pengelolaan Penyelesaian perkara.

Peran strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding adalah dalam hal mengadili perkara tingkat banding di wilayah hukumnya, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukumnya, memberi keterangan pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta, hingga peran melakukan pengawasan jalannya peradilan di pengadilan tingkat pertama dan menjaga peradilan di wilayah hukumnya dilaksanakan kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan tersebut merupakan aspek strategis baik berupa pelaksanaan regulasi maupun dalam hal modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur.

Selain mengeluarkan regulasi dan memperbaiki SOP yang ada, sebagai wujud aspek strategis yang dilakukan untuk mengatasi isu strategis, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga telah mengembangkan Teknologi Informasi berupa inovasi, hal ini bertujuan agar mempermudah dalam pelayanan dan pencapaian kinerja. Beberapa inovasi yang telah dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

#### 1. Indoput (Informasi Download Putusan)

Merupakan inovasi untuk memudahkan masyarakat menemukan dan mendownload putusan-putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan lebih cepat. Indoput merupakan bagian dari website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memuat baik putusan gugatan maupun putusan banding.



Gambar 5 – Inovasi Indoput

## E. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini terdiri dari 4 bab yang berisi:

### 1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Berisi Pendahuluan, Latar Belakang, Kedudukan, Wewenang dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu Straategis serta Sistematika Laporan.

### 2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

### 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### 4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024**

Penyusunan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dilakukan dengan berpedoman kepada tugas dan fungsi, kondisi umum, visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Nasional dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sumber daya manusia (teknis dan non teknis dan ASN) untuk mencapai target kinerja dan dalam rangka pendanaan.

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk sumber modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (*Strengths, weaknesses, Opportunities, Threats*), PEST (*Political, Economic, Social, Tehnological*) atau STEER (*Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory*).

Perencanaan strategis (*Strategic Planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan. Untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan perusahaan, manajer operasi haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis/ *strategic planning*.

Perencanaan strategis secara eksplisit berhubungan dengan manajemen perubahan, hal ini telah menjadi hasil penelitian beberapa ahli menuliskan, bahwa *strategic planning* adalah kegiatan yang mencakup serangkaian proses dari inovasi dan mengubah perusahaan, sehingga apabila *strategic planning* tidak mendukung inovasi dan perubahan maka itu adalah kegagalan.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, terutama dalam bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan lingkungan

pengadilan tingkat banding yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan menegakkan hukum dan keadilan.

Peran pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan pada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta wajib untuk:

- Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.
- Menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara pelayanan publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik hal tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 yaitu dengan:

- Merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik.
- Kompetisi inovasi pelayanan publik.

Adapun visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

***"TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA YANG AGUNG"***

Dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan (yusticia balance).
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Tata Usaha Negara
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara
4. Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi di Pengadilan Tata Usaha Negara

## 1. Tujuan dan Sasaran Strategis

### a. Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding dalam melaksanakan visi dan misi tersebut di atas telah pula menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berusaha melaksanakan apa yang menjadi tujuan dalam organisasi .

Tujuan strategis yang termuat dalam rencana strategis maka untuk melaksanakan misi tersebut dengan baik maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka dirumuskan 3 (tiga) tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
2. Terwujudnya proses peradilan yang efektif dan efisien berbasis Teknologi Informasi
3. Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima.

*Tabel 2 - Reviu Tujuan dan Indikator Tujuan Utama*

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	• Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		• Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	35%
		• Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan	80%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
2.	Terwujudnya proses peradilan yang efektif dan efisien berbasis Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.</li> </ul>	100%

Tabel 3 - Reviu Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu</li> </ul>	90%
<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</li> </ul>		35%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan</li> </ul>		80%	
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase salinan putusan perkara Banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.</li> </ul>	100%

Tabel 4 - Tujuan dan Indikator Kinerja Tambahan

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	100%
Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi		90%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti</li> <li>Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan</li> </ul>		85%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)</li> </ul>		100%	

Tabel 5 - Kinerja dan Indikator Kinerja Tambahan

No	Kinerja Tambahan	Indikator Kinerja Tambahan	Target
1.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	100%
2.	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi	90%
3.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti</li> <li>• Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan</li> </ul>	85% 85%
4.	Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)</li> </ul>	100%

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020-2024. Dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang Agung”.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Rencana Strategis Tahun 2020- 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran adalah:

- Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.
  - 1) Perkara Banding.
  - 2) Perkara Gugatan.
- Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
  - 1) Perkara Banding.
  - 2) Perkara Gugatan.
- Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran adalah:

- Persentase salinan putusan perkara banding yang dikirim kepada para

pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.

- Persentase salinan putusan perkara gugatan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu

Berdasarkan 2 (dua) sasaran strategis tersebut, bisnis inti (*core business*) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada sasaran strategis:

- 1) Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Selain sasaran strategis diatas, untuk mendukung indikator kinerja utama yang telah dituangkan melalui SK SEKMA 173 Tahun 2022, terdapat sasaran kinerja tambahan yang tidak tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rumusan tujuan Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima:

1. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan.
  - Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial.
2. Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan.
  - Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
  - Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti
  - Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan.
4. Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset.
  - Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- 1) Program: Dukungan manajemen

Kegiatan : Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Indikator Kegiatan : Layanan Perkantoran, Operasional dan pemeliharaan kantor.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap pelayanan Peradilan
- Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja).

2) Program: Dukungan manajemen

Kegiatan : Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Indikator Kegiatan: Pembinaan dan pengawasan.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial.
- Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi.
- Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti
- Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan.

3) Program: Program penegakan dan pelayanan hukum

Kegiatan: Peningkatan manajemen peradilan tata usaha negara

Indikator Kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi dan Diseminasi, Perkara Hukum Perseorangan, Layanan Bantuan Hukum Perseorangan.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Presentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.
- Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial.
- Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti
- Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan.

Berikut ini adalah Framework Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta:

<b>VISI:</b> <b>“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA YANG AGUNG”</b>			
<b>MISI:</b> 1. Meningkatkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan ( <i>yusticia balance</i> ). 2. Meningkatkan profesionalisme aparat Peradilan Tata Usaha Negara 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara 4. Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi di Pengadilan Tata Usaha Negara.			
<b>TUJUAN 1:</b> Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta		<b>TUJUAN 2</b> Terwujudnya proses peradilan yang efektif dan efisien berbasis Teknologi Informasi	
<b>SASARAN STRATEGIS 1</b> Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel		<b>SASARAN STRATEGIS 2</b> Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	
<b>Indikator 1</b> Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.	<b>Indikator 2</b> Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	<b>Indikator 3</b> Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	<b>Indikator 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase salinan putusan perkara Banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.</li> <li>• Persentase salinan putusan perkara Gugatan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.</li> </ul>
<b>Program 1 :</b> Program dukungan manajemen  <b>Kegiatan1 :</b> Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.  <b>Indikator Kegiatan1:</b> Layanan Perkantoran, Operasional dan pemeliharaan kantor		<b>Program 2 :</b> Program dukungan manajemen  <b>Kegiatan 2 :</b> Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.  <b>Indikator Kegiatan 2:</b> Layanan Perkantoran, Operasional dan pemeliharaan kantor	<b>Program 3 :</b> Program penegakan dan Pelayanan Hukum  <b>Kegiatan 3 :</b> Peningkatan manajemen peradilan tata usaha negara  <b>Indikator Kegiatan 3:</b> Koordinasi, Sosialisasi dan Diseminasi, Perkara Hukum Perseorangan, Layanan Bantuan Hukum Perseorangan.

<b>TUJUAN 3</b> Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima	
<b>Sasaran Kinerja Lainnya:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan.</li> <li>2. Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan</li> <li>3. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.</li> <li>4. Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset.</li> </ol>	

Gambar 6 - Framework Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

## B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2023 memuat angka target kinerja tahun 2023 untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2023. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*Performance Agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Rencana Kinerja Tahun 2023 telah mengalami Reviu sebanyak 1 kali. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini.

Tabel 6 - Reviu Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2023  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	35%
		c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100%

*Tabel 7 - Reviu Rencana Kinerja (tambahan) Tahun Anggaran 2023  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta*

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Target</b>
1.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	100%
2.	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi	90%
3.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85%
4.	Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	100%

### **C. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2023 menjadi tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2023. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan rencana kinerja tahun 2023 yang disusun pada awal tahun 2023. Dengan adanya review Renstra 2020-2024 dari IKU Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2023, maka Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang akan dicapai pada tahun 2023 diselaraskan dengan sasaran hasil review yang telah dilaksanakan.

Tabel 8 - Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	35%
		c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	80%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 15.958.194.000
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 53.400.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 179.216.000

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang diperjanjikan pada tahun 2023. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2023 dinyatakan berhasil karena pada dua sasaran strategis berhasil memenuhi rata-rata capaian lebih dari 100%. Sasaran Strategis “Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” capaiannya sebesar 112,17%, dan untuk Sasaran Strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” capaiannya sebesar 100%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara Jakarta telah berhasil mencapai target untuk mewujudkan sasaran Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dari Reviu Ke-2 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 2020-2024. Analisis capaian kinerja Tahun 2023 dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022, 2021 dan 2020;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara lainnya;
5. Melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 9 - Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	100%	111,11%
		2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	35%	36,36%	103,90%
		3. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80	97,19	121,49%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I</b>					<b>112,17%</b>
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis II</b>					<b>100%</b>
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Startegis I dan II</b>					<b>106,08%</b>

Tabel 10 - Capaian Kinerja Lainnya  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Lain	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	30	37	123,33%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis III</b>					<b>123,33%</b>

No	Sasaran	Indikator Kinerja Lain	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi	30	32	106,67%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis IV</b>					<b>106,67%</b>
3.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%	100%	117,65%
		2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85%	100%	117,65%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis V</b>					<b>117,65%</b>
4.	Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis VI</b>					<b>100%</b>
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Lainnya</b>					<b>111,91%</b>

### 1. Analisis Capaian Kinerja

#### Sasaran 1 - Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Dari 3 indikator yang diukur pada sasaran ini, 3 (tiga) indikator ini memperoleh capaian  $\geq 100\%$ , dengan rincian sebagai berikut:

1.	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	111,11%
2.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	103,90%
3.	Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	121,49%

**Sasaran 1 – Indikator Kinerja Utama 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu**

Indikator kinerja “Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Jangka waktu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 bulan (perkara gugatan) dan Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 bulan (perkara banding) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

*Tabel 11 - Persentase Penyelesaian Perkara Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023*

Bulan	Perkara Banding Yang Putus Tahun 2023	Perkara Banding Yang Putus Tepat waktu Tahun 2023	Realisasi Perkara Banding Yang Putus Tepat Waktu
Januari	6	6	100%
Februari	21	21	100%
Maret	42	42	100%
April	28	28	100%
Mei	25	25	100%
Juni	22	22	100%
Juli	24	24	100%
Agustus	33	33	100%
September	25	25	100%
Oktober	40	40	100%
November	22	22	100%
Desember	28	28	100%
Jumlah	316	316	100%

*Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta*

Tabel 12 - Persentase Penyelesaian Perkara Gugatan Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023

Bulan	Perkara Gugatan Yang Putus Tahun 2023	Perkara Gugatan Yang Putus Tepat waktu Tahun 2023	Realisasi Perkara Gugatan Yang Putus Tepat Waktu (%)
Januari	2	2	100%
Februari	3	3	100%
Maret	0	0	100%
April	1	1	100%
Mei	3	3	100%
Juni	4	4	100%
Juli	2	2	100%
Agustus	4	4	100%
September	6	6	100%
Oktober	2	2	100%
November	5	5	100%
Desember	1	1	100%
Jumlah	33	33	100%

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Pada Tahun 2023 realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%, karena jumlah perkara yang putus sebanyak 349 perkara seluruhnya diselesaikan tepat waktu. Realisasi indikator ini melebihi target 90% sehingga capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu mencapai 111,11%. Hasil pengukuran persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu mengindikasikan kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 13 - Capaian Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023

Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Banding	Gugatan	Total
Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	316	33	349
Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	316	33	349
Realisasi			100%
Target			90%
Capaian Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu			111,11%

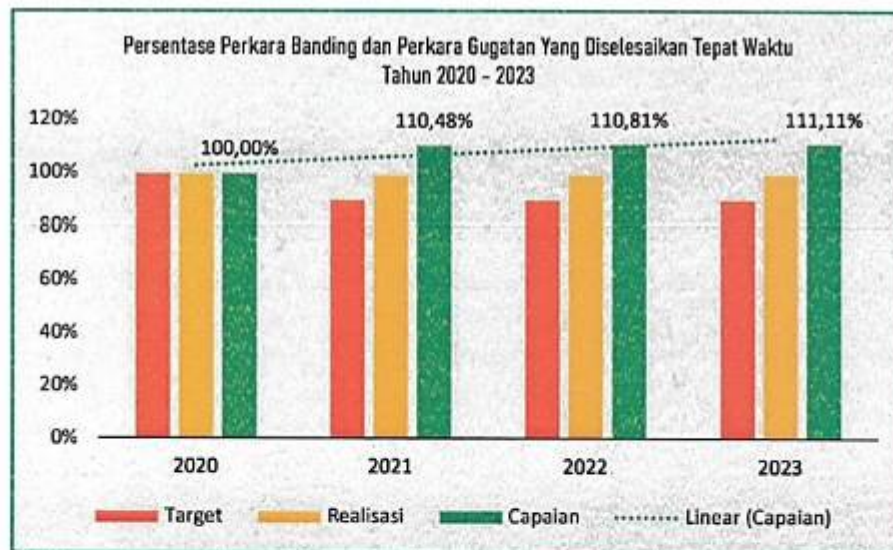
Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Tabel 14 - Perbandingan Capaian Persentase Perkara Banding Dan Perkara Gugatan Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 – 2023

Indikator Kinerja Utama 1	Tahun	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	2020	331	331	100	100	100
	2021	348	346	90	99,43	110,47
	2022	382	381	90	99,73	110,81
	2023	349	349	90	100	111,11

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2022 untuk perkara gugatan terdapat 1 perkara yang tidak terselesaikan tepat waktu hal ini dikarenakan penggugatnya sakit dan telah dibuatkan berita acara, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 2 perkara yang tidak tepat waktu hal ini disebabkan karena adanya peristiwa pandemi.



Grafik 1 - Persentase Perkara Banding dan Perkara Gugatan Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 s.d. 2023

Tabel 14 dan Grafik 1 diatas menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian presentase perkara banding dan perkara gugatan yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Setiap tahunnya realisasi kinerja presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu selalu mengalami peningkatan (trend naik), hal

ini menunjukkan bahwa setiap tahun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selalu berupaya memberikan kinerja yang maksimal dalam menyelesaikan perkara.

Tabel 15 - Sasaran I. Capaian IKU 1 Dalam Renstra PT TUN Jakarta 2020-2024

Indikator Kinerja Utama 1	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Perubahan Realisasi (Δ)	Realisasi Terhadap Target Thn. 2024 (%)
Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	2020	PB:100 PG:100	PB:100 PG:100	PB:100 PG:100	NA	PB:100 PG:111,11
	2021	90	99,43	110,47	-0,57	PB:99,43 PG:110,47
	2022	90	99,73	110,82	+0,3	PB:99,74 PG:110,82
	2023	90	100	111,11	+0,27	PB:100 PG:111,11
	2024	PB:100 PG:90				

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Perkara PT TUN Jakarta, PB (Perkara Banding) dan PG (Perkara Gugatan)

Realisasi IKU 1 persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 terhadap target tahun 2024 diperoleh capaian perkara banding sebesar 100% dan capaian perkara gugatan sebesar 111,11%.

Adapun faktor yang mendukung tercapainya kinerja presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4(empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding dan maksimal 5 (lima) bulan untuk perkara gugatan. Berdasarkan aturan tersebut, maka Hakim dan Panitera bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara tepat waktu.
2. Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Pimpinan dan Hakim Pengawas bidang terhadap penyelesaian perkara.
3. Adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara majelis hakim, panitera pengganti dan bagian kepaniteraan.
4. Pengembangan kapasitas SDM Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk tenaga teknis dengan cara mengikutsertakan dalam pelatihan/diklat, forum group discussion (FGD), Kelompok Kerja, bimbingan teknis, dan sosialisasi.

### Sasaran 1 – Indikator Kinerja Utama 2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari jumlah perkara yang diselesaikan. Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan pengadilan yaitu penerimaan pihak berperkara terhadap putusan pengadilan.

Tabel 16 - Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023

Bulan	Jumlah Perkara Putus Tahun 2023	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Realisasi Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi (%)
Januari	2	0	2	100%
Februari	3	2	1	33,33%
Maret	0	0	0	0
April	1	0	1	100%
Mei	3	2	1	33,33%
Juni	4	4	0	0
Juli	2	1	1	50%
Agustus	4	3	1	25%
September	6	2	4	66,67%
Oktober	2	2	0	0
November	5	4	1	20%
Desember	1	1	0	0
Jumlah	33	21	12	36,36%

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Pada Tahun 2023 realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi  $\geq$  35% (target) yakni sebesar 36,36%. Hasil pengukuran presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi mengindikasikan kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

*Tabel 17 - Capaian Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023*

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Total
Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	12
jumlah perkara yang diselesaikan	33
Realisasi	36,36%
Target	35%
Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	103,90%

*Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta*

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Banding tahun 2023 sebanyak 33 perkara, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 21 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 12 perkara. Target yang ditetapkan sebesar 35% sehingga capaian kinerjanya indikator ini adalah sebesar 103,90 %.

*Tabel 18 - Perbandingan Capaian Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 - 2023*

Indikator Kinerja Utama 2	Tahun	Jumlah Perkara Putus Tingkat Banding Tahun 2023	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	2020	24	13	11	100	45,83	45,83
	2021	25	17	8	50	32	64
	2022	37	26	11	35	29,73	84,94
	2023	33	21	12	35	36,36	103,90

*Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta*

Meningkatnya capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2023 disebabkan oleh kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan salah satunya adalah putusan pengadilan tingkat banding dan semakin mudahnya akses penyampaian informasi putusan kepada para pihak pencari keadilan.



Grafik 2 - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 s.d. 2023

Dari grafik 2 diatas pada tahun 2020, 2021 dan 2022 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menurunkan target IKU 2 dari 100% menjadi 50% dan diturunkan kembali menjadi 35% dan target IKU 2 tahun 2023 tetap dipertahankan sebesar 35% sehingga diperoleh capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 103,90%. Jika dilihat dari trend capaian sejak tahun 2020 s.d. 2023 terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Tabel 19 - Sasaran I. Capaian IKU 2 Dalam Renstra PT TUN Jakarta 2020-2024

Indikator Kinerja Utama 2	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Perubahan Realisasi (Δ)	Realisasi Terhadap Target Thn. 2024 (%)
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	2020	100	45,83	45,83	NA	PB:114,57 PG:183,32
	2021	50	32	64	-13,83	PB:80 PG:128
	2022	35	29,73	84,94	-2,27	PB:74,33 PG:118,92
	2023	35	36,36	103,90	+1,36	PB:90,9 PG:145,44
	2024	PB:40 PG:25				

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta, PB (Perkara Banding) dan PG (Perkara Gugatan)

Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi IKU 2 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023 sebesar 36,36% atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 35% sehingga diperoleh capaiannya sebesar 103,90%. Hasil pengukuran persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi mengindikasikan kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Perbandingan capaian IKU 2 persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Tahun 2023 terhadap proyeksi target Renstra (2024) diperoleh capaian perkara banding sebesar 90,9% dan capaian perkara gugatan sebesar 145,44%. Capaian IKU 2 tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan capaian kinerja dengan diturunkannya target dari 100% menjadi 35%.

Faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya upaya hukum kasasi karena pihak pencari keadilan merasa tidak puas terhadap hasil putusan pengadilan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi.

#### **Sasaran 1 – Indikator Kinerja Utama 3. Indeks Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**

Indikator kinerja ini mengacu pada Permenpan No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Nilai Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2023 memperoleh realisasi sebesar 97,19% dengan capaian sebesar 121,49%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.

*Tabel 20 - Capaian Indeks Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2023*

Indikator Kinerja Utama 3	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	96,53	98,08	97,63	96,53
Realisasi				97,19
Target				80
Capaian Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan				121,49%

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Pelayanan

Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan

#### 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

#### 9. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Tabel 21 - Pemantauan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

No	Unsur Pelayanan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Rerata
1.	Persyaratan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2.	Prosedur	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
3.	Waktu Pelayanan	3,90	4,00	4,00	3,90	3,95
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	<b>3,80</b>	<b>4,00</b>	<b>3,80</b>	<b>3,80</b>	<b>3,85*</b>
5.	<b>Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</b>	<b>3,80</b>	<b>4,00</b>	<b>3,80</b>	<b>3,80</b>	<b>3,85*</b>
6.	Kompetensi Pelaksana	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
7.	<b>Pelaku Pelaksana</b>	<b>3,80</b>	<b>3,90</b>	<b>3,90</b>	<b>3,80</b>	<b>3,85*</b>
8.	Sarana Prasarana	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
9.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
<b>Nilai Rata-Rata</b>		<b>3,90</b>	<b>3,96</b>	<b>3,92</b>	<b>3,90</b>	<b>3,92</b>
<b>Nilai Indeks Setelah Konversi/IKM</b>		<b>96,53</b>	<b>98,08</b>	<b>97,63</b>	<b>96,53</b>	<b>97,19</b>
<b>Mutu Pelayanan</b>		<b>A</b>				
<b>Kinerja Unit Pelayanan</b>		<b>Sangat Baik</b>				

Sumber data: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

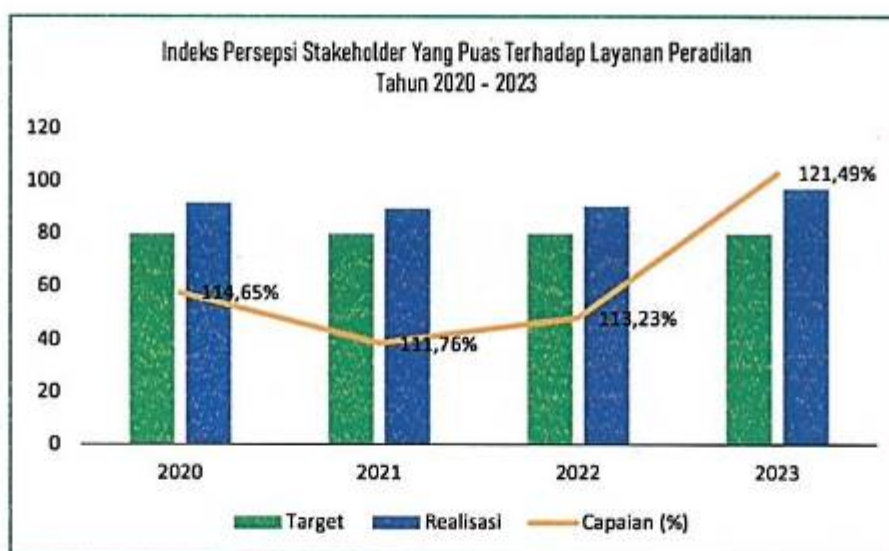
Dari hasil rekapitulasi indeks rata-rata survey kepuasan masyarakat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mendapat nilai sebesar 97,19 dengan kategori pelayanan "Sangat Baik". Nilai terendah terdapat pada unsur Biaya/Tarif, hal ini menggambarkan bahwa harapan masyarakat terhadap Biaya/Tarif agar lebih murah. Adapun nilai terendah kedua terdapat pada aspek produk spesifikasi jenis pelayanan, hal ini menggambarkan adanya harapan masyarakat terhadap produk spesifikasi jenis pelayanan di pengadilan untuk menjadi lebih baik, dan nilai terendah terakhir adalah Pelaku Pelaksana, hal ini menggambarkan bahwa sikap petugas dalam memberikan pelayanan untuk menjadi lebih baik, ketiga kelemahan ini menjadi fokus

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam penentuan kebijakan serta langkah-langkah nyata dalam peningkatan perbaikan pelayanan publik dimasa mendatang.

Tabel 22 - Perbandingan Indeks Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020 – 2023

Indikator Kinerja Utama 3	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	2020	80	91,72	114,65
	2021	80	89,41	111,76
	2022	80	90,58	113,23
	2023	80	97,19	121,49

Sumber data: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta



Grafik 3 - Indeks Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020 - 2023

Dari grafik 3 menunjukkan terus terjadi peningkatan indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan dari tahun sebelumnya.

Tabel 23 - Sasaran 1. Capaian IKU 3 Dalam Renstra PT TUN Jakarta 2020-2024

Indikator Kinerja Utama 3	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Perubahan Realisasi (Δ)	Realisasi Terhadap Target Thn. 2024 (%)
Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	2020	80	91,72	114,65	NA	100,79
	2021	80	89,41	111,76	-2,31	98,25
	2022	80	90,58	113,23	+1,17	99,53
	2023	80	97,19	121,49	+6,61	106,80
	2024	91				

Sumber data: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi IKU 3 Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2023 sebesar 97,19 % atau melebihi target yang ditetapkan sehingga capaiannya sebesar 121.49%. Hasil pengukuran Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan mengindikasikan kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan

Faktor yang mendukung capaian IKU 3 adalah:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang melayani masyarakat pengguna layanan Pengadilan melalui *Briefing, Bimbingan Teknis Pemberian Layanan Informasi Publik*.
2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai untuk seluruh kalangan termasuk pengguna disabilitas.
3. Kebijakan untuk memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan dan SOP.

#### Sasaran 2 - Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja utama dengan hasil capaian sebesar 100%.

1. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu 100%

**Sasaran 2 – Indikator Kinerja Utama 1. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.**

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan yang dikirim. Pada tahun 2023 indikator ini mencapai target 100% artinya seluruh salinan putusan dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

Pengiriman salinan putusan ke pengadilan Pengaju mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, yaitu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pada tahun 2023, jumlah putusan perkara banding sebanyak 316 perkara dan sebanyak 316 perkara banding dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu, dan jumlah putusan perkara gugatan sebanyak 33 perkara, salinan putusannya telah disampaikan kepada para pihak tepat waktu. Berikut tabel rincian pengiriman salinan putusan perkara banding dan perkara gugatan ke para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.

*Tabel 24 - Persentase Salinan Putusan Perkara Banding Yang Dikirim Kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023*

Bulan	Jumlah Salinan Perkara Banding yang Dikirim ke para pihak/pengadilan pengaju	Jumlah Salinan Perkara Banding yang Dikirim ke para pihak/pengadilan pengaju Tepat waktu	Realisasi
Januari	6	6	100%
Februari	21	21	100%
Maret	42	42	100%
April	28	28	100%
Mei	25	25	100%
Juni	22	22	100%
Juli	24	24	100%
Agustus	33	33	100%
September	25	25	100%
Oktober	40	40	100%
November	22	22	100%
Desember	28	28	100%
Jumlah	316	316	100%

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

*Tabel 25 - Persentase Salinan Putusan Perkara Gugatan Yang Dikirim Kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023*

Bulan	Jumlah Salinan Perkara Gugatan yang Dikirim ke para pihak/pengadilan pengaju	Jumlah Salinan Perkara Gugatan yang Dikirim ke para pihak/pengadilan pengaju Tepat waktu	Realisasi
Januari	2	2	100%
Februari	3	3	100%
Maret	0	0	100%
April	1	1	100%
Mei	3	3	100%
Juni	4	4	100%
Juli	2	2	100%
Agustus	4	4	100%
September	6	6	100%
Oktober	2	2	100%
November	5	5	100%
Desember	1	1	100%
Jumlah	33	33	100%

*Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta*

*Tabel 26 - Capaian Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023*

Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	Bandung	Gugatan	Total
Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu	316	33	349
Jumlah putusan yang dikirim	316	33	349
Realisasi			100%
Target			100%
Capaian Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu			100%

*Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta*

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan capaian kinerja sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 27 - Perbandingan Capaian Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2020 - 2023

Sasaran 2 Indikator Kinerja Utama 1	Tahun	Jumlah Salinan Perkara yang Dikirim ke para pihak/pengadilan pengaju	Jumlah Salinan Perkara yang Dikirim ke para pihak/pengadilan pengaju Tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	2020	331	331	100	100	100
	2021	348	348	100	100	100
	2022	382	382	100	100	100
	2023	349	349	100	100	100

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta



Grafik 4 - Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2020- 2023

Grafik 4 menunjukkan persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu sejak tahun 2020 – 2023 capaiannya 100%.

Tabel 28 - Sasaran II. Capaian IKU 1 Dalam Renstra PT TUN Jakarta 2020-2024

Sasaran 2 Indikator Kinerja Utama 1	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Perubahan Realisasi (Δ)	Realisasi Terhadap Target Thn. 2024 (%)
Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	2020	100	100	100	NA	PB:100 PG:100
	2021	100	100	100	0	PB:100 PG:100
	2022	100	100	100	0	PB:100 PG:100
	2023	100	100	100	0	PB:100 PG:100
	2024	PB:100 PG:100				

Sumber data: Laporan Bulanan Data Perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta, PB (Perkara Banding) dan PG (Perkara Gugatan)

Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi sasaran 2 IKU 1 “Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu” perbandingan capaian Tahun 2023 terhadap proyeksi target akhir Renstra 2024 telah tercapai untuk perkara banding sebesar 100% dan perkara gugatan sebesar 100%.

Faktor pendukung dalam capaian ini adalah:

1. Pengiriman salinan putusan ke para pihak/pengadilan pengaju terlaksana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2011. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara perdata dikenakan biaya PNBPN, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan.
2. Profesionalisme Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab.
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh pimpinan.

## 2. Capaian Kinerja Lainnya

### Sasaran 3 - Meningkatnya Hasil Pembinaan Bagi Aparatur Tenaga Teknis Dilingkungan Peradilan

Sumber daya tenaga teknis merupakan sumber daya manusia dibidang peradilan yang menjalankan tugas dan kewajibannya dalam proses yustisial. Sumber

daya tenaga teknis yustisial ini meliputi Hakim dan Panitera dan kesemuanya memiliki peranan strategis dalam menjalankan proses penanganan perkara di pengadilan. Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan. Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja dengan hasil capaian sebesar 123,33%.

- Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial 123,33%

**Sasaran 3 – Indikator Kinerja 1. Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial.**

Indikator kinerja “Persentase SDM Teknis Yang Mempunyai Kemampuan Dibidang Teknis Yudisial” adalah Perbandingan Jumlah SDM teknis yang mengikuti diklat, FGD, KK, Bimtek dan Sosialisasi tenaga teknis yudisial dengan Target SDM Teknis yang mengikuti diklat, FGD, KK, Bimtek dan Sosialisasi tenaga teknis yudisial dalam 1 tahun (30 orang). Capaian dari indikator kinerja persentase sdm teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial sebesar 123,33%.

*Tabel 29 - Capaian Persentase SDM Teknis Yang Mempunyai Kemampuan Di bidang Teknis Yudisial Tahun 2023*

Persentase SDM Teknis Yang Mempunyai Kemampuan Dibidang Teknis Yudisial	Diklat	FGD/KK	Bimtek	Sosialisasi	Total
Jumlah SDM teknis yang mengikuti diklat, FGD, KK, Bimtek dan Sosialisasi tenaga teknis yudisial	3	18	12	4	37
Realisasi					37
Target					30
Capaian Persentase SDM Teknis Yang Mempunyai Kemampuan Dibidang Teknis Yudisial					123,33%

Sumber data: Laporan Bulanan Data Kepegawaian PT TUN Jakarta

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah mengikutsertakan dan memfasilitasi para tenaga teknis yang merupakan sumber daya manusia dibidang teknis yudisial untuk mengikuti kegiatan sebagai berikut di Tahun 2023:

Tabel 30 - Kegiatan Pelatihan, FGD, KK, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Untuk SDM Tenaga Teknis Yudisial

No	Uraian Kegiatan	Tempat	Tanggal
1.	FGD Penyusunan Naskah "Pembentukan Peraturan Tentang Nasihat-nasihat Bidang Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Menjalankan Kedudukannya sebagai Lembaga Penasehat"	Hotel Manhattan Jakarta	7 Maret 2023
2.	Bimbingan Teknis Pemberian Layanan Informasi Publik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Hotel Holiday Inn Jakarta	13 s.d. 15 Maret 2023
3.	FGD "Tingkat Kepatuhan Hakim Agung Atas Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI"	Hotel Holiday Inn Jakarta	15 Maret 2023
4.	FGD Penyusunan Naskah "Peraturan Mahkamah Agung tentang Cara Seleksi, Pemilihan dan Pengajuan Hakim Konstitusi Oleh Mahkamah Agung"	Holiday Inn Jakarta	16 Maret 2023
5.	Sosialisasi Pembaharuan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama Versi 5.2.0 dan Aplikasi E-Court Versi 5.0.0	PT TUN Jakarta	4 April 2023
6.	Bimbingan Teknis Akses Keadilan dan Perlindungan Bagi Perempuan Yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Grand Zuri Yogyakarta	24 s.d. 26 Mei 2023
7.	Pelatihan Manajemen Administrasi Peradilan Secara Blended Learning Gelombang II Angkatan IV	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI	5 s.d. 16 Juni 2023
8.	FGD Proposal Penyusunan Naskah Urgensi Tahun Anggaran 2023 dengan Judul "Rancangan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberhentian Tetap dan Sementara bagi Hakim Agung, Hakim dan PNS di Lingkungan Mahkamah Agung"	Hotel Grand Mercure Kemayoran	9 Mei 2023
9.	Kegiatan Kelompok Kerja Reviu Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara	Hotel Novotel Gajahmada	10 s.d. 12 Mei 2023
10.	Bimbingan Teknis E-Court (Peradilan Elektronik) pada Pengadilan Tingkat Banding dan E-Court (Peradilan Elektronik) tentang Proses Pemilu dan Pilkada	Nagoya Hill Hotel Batam Hill	17 s.d. 19 Mei 2023
11.	Kegiatan Kelompok Kerja Reviu Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Hotel Grand Orchard	23 Juni 2023

No	Uraian Kegiatan	Tempat	Tanggal
12.	Bimbingan Teknis Administrasi Upaya Hukum Banding secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Hotel Grand Orchardz	21 s.d. 23 Juni 2023
13.	Pelatihan Singkat Sengketa Dalam Perkara Pemilihan Kepala Daerah Bagi Hakim Tingkat Banding Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	Hotel Movenpick Surabaya City	26 Juni s.d. 7 Juli 2023
14.	Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Daring	26 s.d. 28 Juli 2023
15.	Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Hotel Holiday Inn & Suites Gajahmada	26 s.d. 28 Juli 2023
16.	FGD dengan tema "Implementasi asas-asas umum Pemerintahan yang Baik dalam Pengurusan Piutang Negara untuk Menyelesaikan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia:	Bandung	25 s.d. 28 Juli 2023
17.	Kegiatan Kelompok Kerja Penyusunan Pola Karis dan Pedoman Eksaminasi Tenaga Teknis Kepaniteraan pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Hotel harris Kelapa Gading	4 s.d. 6 Oktober 2023
18.	Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan	Bandung	12 s.d.14 Oktober 2023
19.	Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Jakarta	11 s.d.13 Oktober 2023
20.	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Kepegawaian Bagi Para Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara		18 s.d. 20 Oktober 2023
21.	Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Jurusita dan Juru Sita Pengganti di Lingkungan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta		18 s.d. 20 Oktober 2023
22.	FGD dengan tema "Parens Patriae Kebijakan Hukum Administrasi Negara dalam Pengurusan Piutang Negara: Analisis terhadap Proses Penyelesaian Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.	Bali	29 November s.d. 1 Desember 2023

Sumber data: Laporan Bulanan Data Kepegawaian PT TUN Jakarta

#### Sasaran 4 - Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam meningkatnya kompetensi SDM Non Teknis Peradilan. Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja dengan hasil capaian sebesar 106,67%.

- Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi 106,67%

#### Sasaran 4 – Indikator Kinerja 1. Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan.

Indikator kinerja “Persentase SDM Non Teknis Peradilan Yang Mengikuti Diklat, Bimtek Dan Sosialisasi” adalah Perbandingan Jumlah SDM Non Teknis Yang Mengikuti Diklat, Bimtek, dan Sosialisasi dengan Target SDM non teknis yang mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi dalam 1 tahun (30 orang). Capaian dari indikator kinerja persentase sdm teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial sebesar 106,67%.

Tabel 31 - Capaian Persentase SDM Non Teknis Peradilan Yang Mengikuti Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Tahun 2023

Persentase SDM Non Teknis Peradilan Yang Mengikuti Diklat, Bimtek Dan Sosialisasi	Diklat	Bimtek	Sosialisasi	Total
Jumlah SDM non teknis yang mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi	5	22	5	32
Realisasi				32
Target				30
Capaian Persentase SDM Non Teknis Peradilan Yang Mengikuti Diklat, Bimtek Dan Sosialisasi				106,67%

Sumber data: Laporan Bulanan Data Kepegawaian PT TUN Jakarta

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah mengikutsertakan dan memfasilitasi para sumber daya manusia non teknis untuk mengikuti kegiatan sebagai berikut di Tahun 2023:

Tabel 32 - Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Untuk SDM Non Teknis

No	Uraian Kegiatan	Tempat	Tanggal
1.	Bimbingan Teknis SAKTI bagi Satuan Kerja Lingkup KPPN Jakarta VI	KPPN Jakarta VI	27 Februari 2023
2.	Bimbingan Teknis Pemberian Layanan Informasi Publik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Hotel Holiday Inn Jakarta	13 s.d. 15 Maret 2023

No	Uraian Kegiatan	Tempat	Tanggal
3.	Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara	Badan Litbang Diklat Kumdil	30 Mei s.d. 2 Juni 2023
4.	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara Berkerjasama dengan Diklat PKN BPK RI	Badan Diklat PKN BPK RI	15 s.d. 17 Mei 2023
5.	Standarisasi Layanan Kepegawaian terkait Implementasi Aplikasi SIASN bagi Layanan Administrasi Kepegawaian Tenaga Teknis pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Hotel Grand Orchardz Kemayoran	21 s.d.23 Juni 2023
6.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XIX	Puslitbang PKASN LAN Jatinangor	20 s.d. 22 Juni 2023
7.	Sosialisasi Optimalisasi IKPA dan Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KPP) bagi Satker Lingkup KPPN Jakarta VI	KPPN Juanda VI	22 Juni 2023
8.	Sosialisasi Pengisian Target Capaian Output Satker dan Optimalisasi Penggunaan Digipay-KKP	KPPN Juanda VI	21 Juli 2023
9.	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Semester I Tahun 2023	Kanwil DJPb	14 Juli 2023
10.	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran melalui Aplikasi SMART pada Empat Lingkungan Peradilan se-wilayah Propinsi DKI Jakarta	Hotel Holiday Inn	12 s.d. 14 Juli 2023
11.	Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian secara Online dari Tempat Tugas Angkatan 11 Tahun 2023	Daring	5 s.d. 18 September 2023
12.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi bagi ASN terhadap Penguasaan Teknologi Informasi Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Hotel Harris Kelapa Gading	4 s.d. 6 Oktober 2023
13.	Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Jakarta	11 s.d.13 Oktober 2023

Sumber data: Laporan Bulanan Data Kepegawaian PT TUN Jakarta

#### **Sasaran 5 - Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat

peradilan secara optimal. Sasaran ini memiliki 2 indikator kinerja dengan hasil capaian sebesar 117,65%.

▪ Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	117,65%
▪ Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	117,65%

**Sasaran 5 – Indikator Kinerja 1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti**

*Tabel 33 - Capaian Persentase Pengaduan Yang Dapat Ditindaklanjuti Tahun 2023*

Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	Total
Jumlah pengaduan yang sudah ditindaklanjuti	5
Jumlah pengaduan yang di terima PT TUN Jakarta dan yang dapat ditindaklanjuti.	5
Realisasi	100
Target	85%
Capaian Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	117,65%

Sumber data: Laporan Bulanan Data Perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti adalah perbandingan antara Jumlah pengaduan yang sudah ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang di terima PT TUN Jakarta dan yang dapat ditindaklanjuti. Indikator ini untuk mengukur kinerja dalam menindaklanjuti pengaduan yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan realisasi sebesar 100% dari target 85% sehingga capaian kinerja ini sebesar 117,65%.

*Tabel 34 - Perbandingan Capaian Persentase Pengaduan Yang Dapat Ditindaklanjuti Tahun 2020 - 2023*

Sasaran 5 Indikator Kinerja 1	Tahun	Jumlah pengaduan yang sudah ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan yang di terima PT TUN Jakarta dan yang dapat ditindaklanjuti.	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	2020	10	10	80	100	125
	2021	17	17	80	100	125
	2022	12	12	85	100	117,65
	2023	5	5	85	100	117,65

Sumber data: Laporan Bulanan Data Perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Jumlah pengaduan yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sejak tahun 2020 s.d. 2023 mengalami trend penurunan, namun dengan persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti realisasinya mencapai 100% sehingga capaiannya telah melebihi dari target yang ditentukan.

**Sasaran 5 – Indikator Kinerja 2. Persentase Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasikan**

*Tabel 35 - Persentase Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasikan Tahun 2023*

Persentase Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti Dan Dipublikasikan	Total
Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	5
Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti	5
Realisasi	100
Target	85%
Capaian Persentase Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti Dan Dipublikasikan	117,65%

Sumber data: Laporan Bulanan Data Perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan dengan jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan dalam menangani pengaduan yang diproses oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan realisasi sebesar 100% dari target 85% sehingga capaian kinerja ini sebesar 117,65%.

*Tabel 36 - Perbandingan Capaian Persentase Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasikan Tahun 2020 - 2023*

Sasaran 5 Indikator Kinerja 2	Tahun	Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasikan	2020	10	10	70	100	125
	2021	17	17	75	100	125
	2022	12	12	85	100	117,65
	2023	5	5	85	100	117,65

Sumber data: Laporan Bulanan Data Perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Jumlah pengaduan yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sejak tahun 2020 s.d. 2023 mengalami trend penurunan, namun dengan persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan realisasinya mencapai 100% sehingga capaiannya telah melebihi dari target yang ditentukan.

**Sasaran 6 - Meningkatkan transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset. Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja dengan hasil capaian sebesar 100%.

Bahwa dalam penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Tahun 2023, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan menggunakan aplikasi *e-kinerja* BKN. Orientasi Penilaian dalam Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak hanya berfokus pada hasil kinerja dan pegawai yang bersangkutan, akan tetapi meliputi:

1. Pengembangan Kinerja Pegawai;
2. Pemenuhan Ekpektasi Pimpinan;
3. Dialog Kinerja yang intens antara Pimpinan dan Pegawai;
4. Pencapaian Kinerja Organisasi; dan
5. Hasil Kerja dan Perilaku Kerja Pegawai.

Proses pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120/SEK/SK/II/2023 tentang pedoman pengelolaan kinerja aparatur sipil negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Melalui Aplikasi *e-Kinerja*.

Pengelolaan kinerja pegawai terdiri dari:

1. Perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi espektasi;
2. Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja pegawai.
3. Penilaian kinerja pegawai yang meliputi evaluasi kinerja pegawai dan

4. Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.

Perencanaan kinerja pegawai terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP dengan melakukan dialog kinerja untuk penetapan dan klarifikasi Ekspektasi antara Pimpinan dan Pegawai. Penyusunan dan penetapan SKP dimulai dari Pimpinan tertinggi yang menjabarkan rencana strategis organisasi untuk kemudian dijabarkan oleh pegawai dibawahnya hingga level pegawai terendah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam menentukan perencanaan kinerja pegawai harus memperhatikan hasil/manfaat/output/outcome yang akan dihasilkan oleh perencanaan kerjanya tersebut.

- Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) 100%

**Sasaran 6 - Indikator Kinerja 1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)**

*Tabel 37 - Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) Tahun 2023*

Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	Total
Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kinerja pegawai (SKP) yang "Sangat Baik"	50
Jumlah Pegawai yang sudah menginput penilaian kinerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (e-kinerja)	50
Realisasi	100%
Target	100%
Capaian Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	100%

Sumber data: Laporan Bulanan Data Kepegawaian PT TUN Jakarta

Indikator ini untuk mengukur kinerja sumber daya manusia yang memiliki produktivitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi. Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) adalah perbandingan Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kinerja pegawai (SKP) yang "Sangat Baik" dengan Jumlah Pegawai yang sudah menginput penilaian kinerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (e-kinerja) dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% diperoleh capaian indikator ini sebesar 100%.

Tabel 38 - Perbandingan Capaian Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) Tahun 2022 - 2023

Sasaran 6 Indikator Kinerja 1	Tahun	Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kinerja pegawai (SKP) yang "Sangat Baik"	Jumlah Pegawai yang sudah menginput penilaian kinerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (e-kinerja)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	2022	52	52	100	100	100
	2023	50	50	100	100	100

Sumber data: Laporan Bulanan Data Kepegawaian PT TUN Jakarta

Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sejak tahun 2022 s.d. 2023 tetap stabil, dengan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%.

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja Di Level Nasional (Antar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Dan Mahkamah Agung)

Perhitungan capaian kinerja tidak hanya dilakukan dengan membandingkan antar tahun sebelumnya saja, tapi capaian kinerja juga dibandingkan dengan level nasional. Adapun perbandingan capaian kinerja yang diperoleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 39 - Perbandingan Capaian Kinerja PT TUN Jakarta dengan PT TUN Surabaya, PT TUN Makassar, dan Mahkamah Agung Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS 1					
TERWUJUDNYA PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL					
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2022			
		PT TUN Jakarta	PT TUN Surabaya	PT TUN Makassar	Mahkamah Agung
1.	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	110,81%	111,11%	111,79%	99,05%
	Target	90%	90%	80%	100%
2.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	89,94%	124,09%	118,93%	53,83%
	Target	35%	45%	60%	50%
3.	Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	113,23%	110,06%	109,63%	114,30%
	Target	80%	80%	80%	80%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I		104,66%	115,09%	113,45%	89,06%
SASARAN STRATEGIS 2					
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA					
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2022			
		PT TUN Jakarta	PT TUN Surabaya	PT TUN Makassar	Mahkamah Agung
1.	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100%	111,11%	100%	326,70%
	Target	100%	90%	100%	20%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II		100%	111,11%	100%	326,70%
Rata-Rata Total Capaian Kinerja Sasaran I dan II		102,33%	113,10%	106,73%	207,88%

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Tahun 2022 telah mampu bersaing dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara lainnya serta dilevel nasional. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Tahun 2022 telah berhasil meraih capaian kinerja organisasi diatas 100%. Artinya realisasi kinerja diatas target yang ditetapkan, harapannya mampu memberikan dampak positif dalam efektifitas dan efisiensi pelayanan peradilan.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga melakukan perbandingan capaian kinerja organisasi Tahun 2023 dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2023, adapun hasilnya sebagai berikut:

*Tabel 40 - Perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2023*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PT TUN Jakarta Tahun 2023		PT TUN Surabaya Tahun 2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian
Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	1. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	111,11%	90%	111,11%
	2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	35%	103,90%	45%	141,51%
	3. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80	121,49%	80	113,75%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I			112,17		122,12%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	90%	111,11
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II			100%		111,11
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran I dan II			106,08%		116,62

Sumber data: Data Renprog PT TUN Surabaya Tahun 2023

Dari tabel 40 dapat dianalisa bahwa data capaian tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dibandingkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, untuk indikator kinerja Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan memiliki target yang sama namun hasil capaian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta lebih tinggi 7,74 point. Capaian Sasaran Strategis I dan II untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  $\geq$  100%, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah berhasil meraih capaian kinerja organisasi diatas 100% dan memenuhi target standar nasional.

Tabel 41 - Perbandingan Realisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Target Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	PK 2023 Mahkamah Agung	Capaian PT TUN Jakarta (%)
Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	1. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	36,36%	50%	72,72%
	3. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	97,19	80	121,49%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran I				98,07%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100%	20%	500%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran II				500%
Rata-rata Total Capaian Kinerja Sasaran I dan II				299,04%

\*) Target Standar Nasional (Mahkamah Agung) dengan Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2023, Sumber data dari website Mahkamah Agung RI

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melakukan perbandingan realisasi kinerja organisasi Tahun 2023 dengan Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2023 adapun hasilnya dari tabel 41 dapat dianalisa bahwa data realisasi tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dibandingkan dengan target Standar Nasional (Mahkamah Agung) berdasarkan perjanjian kinerja Mahkamah Agung 2023, maka diperoleh hasil Capaian Sasaran Strategis I “Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” sebesar 98,07% dan Capaian Sasaran Strategis II “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” sebesar 500% sehingga rata-rata total capaian kinerja strategis I dan II sebesar 299,04%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah berhasil meraih capaian kinerja organisasi diatas 100% dan memenuhi target standar nasional.

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Disajikan dalam tabel berikut ini mengenai analisa penyebab faktor keberhasilan dan faktor kegagalan dalam capaian kinerja serta solusi yang dapat dilakukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja:

Tabel 42 - Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	100%	111,11%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indikator kinerja ini telah menunjukkan keberhasilan dengan realisasi sebesar 100%</li> <li>▪ <b>Faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini:</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan pemantauan terhadap IKU secara berkala, bulanan dan triwulan dan jika ditemukan target tidak tercapai dilakukan perubahan target perjanjian kinerja berdasarkan hasil monitoring berkala.</li> <li>▪ Reviu SOP</li> <li>▪ Melakukan rapat berjenjang tentang kinerja organisasi</li> </ul>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						<ol style="list-style-type: none"> <li>1. urat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4(empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding dan maksimal 5 (lima) bulan untuk perkara gugatan. Dengan aturan ini, maka Hakim dan Panitera bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara tepat waktu.</li> <li>2. Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Pimpinan dan Hakim Pengawas bidang terhadap penyelesaian perkara.</li> <li>3. Adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara majelis hakim, panitera pengganti dan bagian kepaniteraan</li> </ol>	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						<p>4. Pengembangan kapasitas SDM Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk tenaga teknis dengan cara mengikutsertakan dalam pelatihan/diklat, forum group discussion (FGD), Kelompok Kerja, bimbingan teknis, dan sosialisasi</p> <p>5. Adanya standar operasional prosedur (SOP) jangka waktu penyelesaian perkara</p> <p>▪ <b>Faktor yang dapat menghambat tidak tercapainya indikator kinerja ini:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minutasi terlambat</li> <li>2. Jaringan internet terputus atau sambungan internet lemah</li> </ol>	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	35%	36,36%	103,90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indikator kinerja ini telah menunjukkan keberhasilan dengan realisasi sebesar 36,36% melebihi target yang telah ditentukan sebesar 35%.</li> <li>▪ <b>Faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini:</b> Para pihak pencari keadilan merasa puas terhadap hasil putusan pengadilan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding</li> <li>▪ <b>Faktor yang dapat menyebabkan indikator ini tidak tercapai:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak pencari keadilan merasa tidak puas terhadap hasil putusan pengadilan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi.</li> <li>2. Pemberitahuan dalam perkara upaya hukum tidak tepat waktu sehingga pengiriman berkas menjadi terhambat.</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan pemantauan terhadap IKU secara berkala, bulanan dan triwulan dan jika ditemukan target tidak tercapai dilakukan perubahan target perjanjian kinerja berdasarkan hasil monitoring berkala.</li> <li>▪ Reviu SOP</li> <li>▪ Melakukan rapat berjenjang tentang kinerja organisasi</li> </ul>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		3. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80	97,19	121,49%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indikator kinerja ini telah menunjukkan keberhasilan dengan realisasi sebesar 97,19 melebihi target yang telah ditentukan sebesar 80</li> <li>▪ <b>Faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang melayani masyarakat pengguna layanan Pengadilan melalui Briefing, Bimbingan Teknis Pemberian Layanan Informasi Publik.</li> <li>2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai untuk seluruh kalangan termasuk pengguna disabilitas.</li> <li>3. Kebijakan untuk memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan dan SOP.</li> <li>4. Pembinaan dan pengawasan secara berkala</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan pemantauan terhadap IKU secara berkala, triwulan dan jika ditemukan target tidak tercapai dilakukan perubahan target perjanjian kinerja berdasarkan hasil monitoring berkala.</li> <li>▪ Reviu SOP</li> <li>▪ Melakukan rapat berjenjang tentang kinerja organisasi</li> <li>▪ Memberikan pelatihan kepada petugas PTSP.</li> </ul>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Faktor yang dapat menyebabkan indikator ini tidak tercapai.</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan sarana dan prasarana yang tidak lengkap dapat berdampak pada efisiensi dan efektifitas penyelesaian tupoksi khususnya pada pengiriman salinan putusan secara tepat waktu ke pengadilan pengaju dapat tidak tercapai</li> <li>2. Penurunan performa pelayanan terpadu satu pintu karena petugas belum mendapatkan pelatihan yang memadai atau tidak disiplin</li> </ol> </li> </ul>	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator kinerja ini telah menunjukkan keberhasilan dengan realisasi sebesar 100% sama dengan target sebesar 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemantauan terhadap IKU secara berkala, triwulan dan jika ditemukan target tidak tercapai dilakukan perubahan target perjanjian kinerja berdasarkan hasil monitoring berkala.</li> <li>• Reviu SOP</li> </ul>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengiriman salinan putusan ke para pihak/pengadilan pengaju terlaksana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2011. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara perdata dikenakan biaya PNB, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan.</li> <li>2. Profesionalisme Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab.</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh pimpinan</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan rapat berjenjang tentang kinerja organisasi</li> </ul>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						<p>4. Tingkat kepatuhan input data perkara kedalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding sudah maksimal</p> <p>5. Penetapan dan pelaksanaan SOP oleh semua Aparatur Peradilan yang proporsional.</p> <p>• <b>Faktor yang dapat menyebabkan indikator ini tidak tercapai.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan sarana dan prasarana yang tidak lengkap dapat berdampak pada efisiensi dan efektifitas penyelesaian tupoksi khususnya pada pengiriman salinan putusan secara tepat waktu ke pengadilan pengaju dapat tidak tercapai.</li> <li>2. Minutasi terlambat karena kapasitas PP tidak sebanding dengan perkara yang ditangani</li> <li>3. Panitera Pengganti menunda-nunda untuk mengerjakan Berita Acara</li> </ol>	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						4. Panitia Pengganti terlambat atau tidak mengisi jadwal sidang pada SIPP	
3.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	1. Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	30	37	123,33%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indikator kinerja ini telah menunjukkan keberhasilan dengan realisasi sebesar 123,33% dengan target 30 orang/pertahun.</li> <li>▪ <b>Faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikutsertakan dan memfasilitasi para tenaga teknis yang merupakan sumber daya manusia dibidang teknis yudisial untuk mengikuti kegiatan pembinaan di Tahun 2023</li> <li>2. Peningkatan kualitas SDM dibidang teknis yudisial</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memfasilitasi pengusulan bimtek, diklat, FGD, sosialisasi terhadap SDM teknis di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta baik secara daring dan luring</li> </ul>
4.	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	1. Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi	30	32	106,67%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indikator kinerja ini telah menunjukkan keberhasilan dengan realisasi sebesar 106,67% dengan target 30 orang/pertahun.</li> <li>▪ <b>Faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah mengikutsertakan dan memfasilitasi para sumber daya manusia non teknis untuk mengikuti kegiatan.</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memfasilitasi pengusulan bimtek, diklat, FGD, sosialisasi terhadap SDM non teknis di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta baik secara daring dan luring</li> </ul>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						2. Peningkatan kualitas SDM non teknis	
5.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%	100%	117,65%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indikator kinerja ini telah menunjukkan keberhasilan dengan realisasi sebesar 100% melebihi target sebesar 85%</li> <li>▪ <b>Faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pengawasan secara berkala</li> <li>2. SOP menjadi pedoman pelaksanaan pekerjaan</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reviu SOP</li> <li>▪ Melakukan rapat berjenjang tentang kinerja organisasi</li> </ul>
		2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85%	100%	117,65%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indikator kinerja ini telah menunjukkan keberhasilan dengan realisasi sebesar 100% melebihi target sebesar 85%</li> <li>▪ <b>Faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pengawasan secara berkala</li> <li>2. SOP menjadi pedoman pelaksanaan pekerjaan</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reviu SOP</li> <li>▪ Melakukan rapat berjenjang tentang kinerja organisasi</li> </ul>
6.	Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset	1. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indikator kinerja ini telah menunjukkan keberhasilan dengan realisasi sebesar 100% sama dengan target sebesar 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monitoring pegawai</li> <li>▪ Reviu SOP</li> <li>▪ Melakukan rapat berjenjang tentang kinerja organisasi</li> </ul>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kepatuhan SDM dalam mengisi SKP (triwulan dan tahunan) dan PKP (tiap bulan) pada aplikasi e-kinerja</li> <li>2. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan produktivitas SDM</li> <li>3. SOP menjadi pedoman pelaksanaan pekerjaan</li> </ol> </li> </ul>	

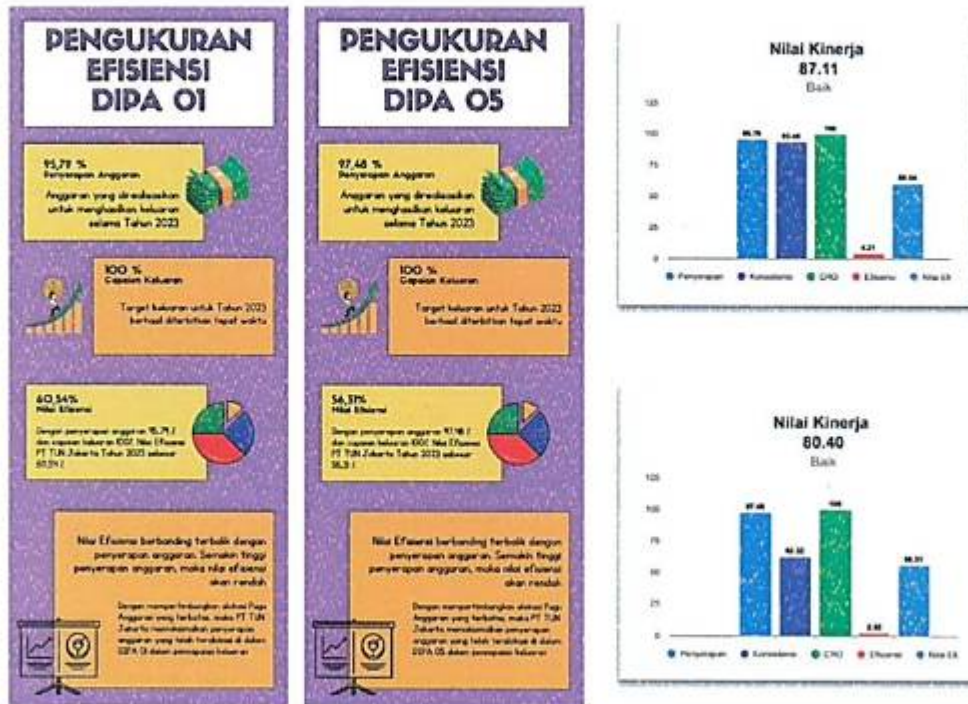
## **5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta “Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel” dan “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya program/ kegiatan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa efisiensi penggunaan anggaran dan pemanfaatan teknologi informasi, diuraikan sebagai berikut:

### **1. Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Upaya efisiensi anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diukur dari evaluasi kinerja anggaran dengan melandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan tersebut mengharuskan entitas Pemerintah dan Lembaga negara untuk melakukan evaluasi kinerja anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran merupakan instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi kualitas. Salah satu aspek yang diukur dalam Evaluasi Kinerja Anggaran adalah tingkat efisiensi.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran per keluaran dan realisasi volume keluaran dengan pagu anggaran per keluaran, dan target volume keluaran.



Sumber data: OMSPAN dan SMART

Gambar 7 - Pengukuran Efisiensi Anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023

## 2. Pemanfaatan teknologi informasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memanfaatkan teknologi dan informasi untuk memberikan pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsi. Beberapa aplikasi tersebut antara lain:

1. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung (SIKEP), sebagai penyimpan database seluruh pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya
2. Aplikasi E-Kinerja
3. Aplikasi Komdanas MA-RI
4. Aplikasi SIPP Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
5. *e-Court* Mahkamah Agung RI, layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.
6. Layanan Penganggaran (SAKTI), yang memudahkan pengelolaan keuangan
7. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE), yang mempersingkat waktu proses pengadaan barang dan jasa.

8. Layanan Sistem Evaluasi dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja (SEMAR) yang memudahkan proses pemantauan implementasi SAKIP.
9. Elektronik Integrated Planning System (E-IPLANS)
10. Aplikasi e-BIMA (*Budgeting Implementation Monitoring and Accountability*), merupakan Aplikasi untuk memonitoring pelaksanaan anggaran serta pertanggungjawaban keuangan di Mahkamah Agung dan Satker dibawahnya.
11. Aplikasi e-Sadewa (*Electronic State Asset Development And Enhancement Work Application*).
12. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), aplikasi berbasis web untuk melakukan monitoring pengelolaan keuangan negara.

Keberadaan beberapa aplikasi tersebut diatas dapat memberikan gambaran pelaksanaan internal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal.

#### **6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023 adalah Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Sasaran Strategis I "Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel" terdiri atas 2 (dua) kegiatan, yaitu:

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi merupakan kegiatan yang memiliki indikator kinerja kegiatan yaitu persentase realisasi anggaran belanja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah:

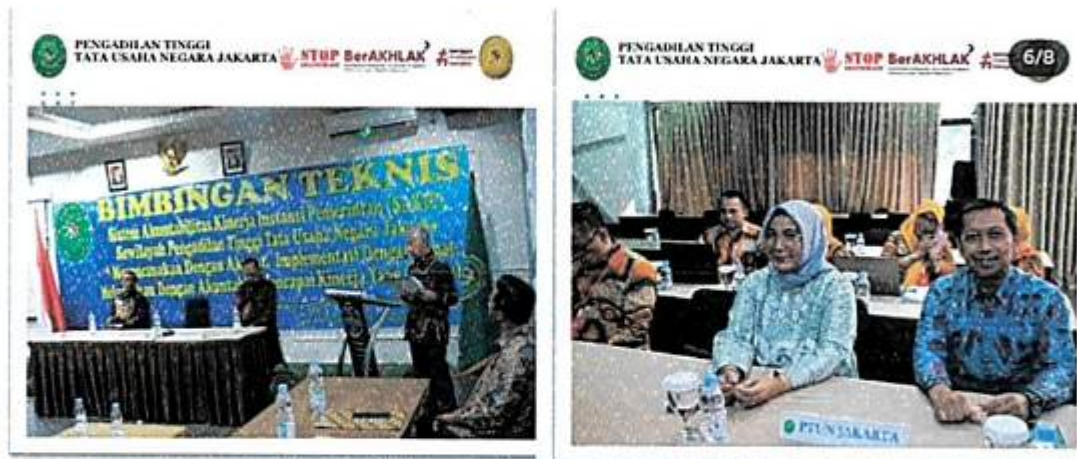
Tabel 43 – Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 01  
Capaian Fisik dengan Capaian Keuangan

No	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
1.	Layanan Umum	1 Laporan	1 Laporan	99,99 %	95,82%
2.	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100 %	95,79%

Sumber data: Detail Kertas Kerja Capaian RO (OM SPAN)

Keberhasilan sasaran program ini didukung oleh keberhasilan pencapaian program/kegiatan sebagai berikut:

- Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Tanggal 11 s.d. 13 Oktober 2023 di sangkan Park Hotel Kuningan sebanyak 18 orang.



- Pembayaran gaji dan tunjangan kinerja

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung merupakan kegiatan yang memiliki indikator kinerja kegiatan yaitu realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

*Tabel 44 - Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Capaian Fisik dengan Capaian Keuangan*

No	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
1.	Layanan Sarana Internal	10 unit	10 unit	100 %	99,88%
2.	Layanan Prasarana Internal	1 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>	99,66 %	100%

Sumber data: Detail Kertas Kerja Capaian RO (OM SPAN)

Keberhasilan sasaran program ini didukung oleh keberhasilan pencapaian program/kegiatan sebagai berikut:

- Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran



- Pengadaan Prasarana Disabilitas (Jalur/Toilet Disabilitas)



Sasaran Startegis II “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” terdiri atas 1 (satu) kegiatan, yaitu:

a. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara merupakan kegiatan yang memiliki indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah aparatur pengadilan yang mendapatkan Bimbingan Teknis Administrasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah:

*Tabel 45 - Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 05  
Capaian Fisik dengan Capaian Keuangan*

No	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
1.	Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara	2 Kegiatan	2 Kegiatan	99,66 %	99,18%
2.	Dukungan penyelesaian perkara	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	100%
3.	Sosialisasi/Bimtek Kompetensi dan Administrasi Penyelesaian Perkara	16 orang	16 orang	100%	96,37%
4.	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Prioritas Nasional)	48 orang	48 orang	100%	99,92%
5.	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (Prioritas Nasional)	1 perkara, berkas perkara	1 perkara, berkas perkara	100%	99,90%

Sumber data: Monitoring Kertas Kerja Rincian Output

Keberhasilan sasaran program ini didukung oleh keberhasilan pencapaian program/kegiatan sebagai berikut:

- Pembinaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 20 s.d. 22 Februari 2023, Berdasarkan Surat Tugas Ketua PTUN Jakarta Nomor W2-TUN/236/PS.01/2/2023 tanggal 16 Februari 2023



- Melakukan pengamanan saat adanya penyampaian pendapat



- Kegiatan Bimbingan Teknis *e-Court* (Peradilan Elektronik) pada Pengadilan Tingkat Banding, *e-Court* Pemilihan Kepala Daerah dan *e-Court* Proses Pemilihan Umum (Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 s.d. 19 Mei 2023 di Hotel Nagoya Hill Hotel Batam dengan jumlah 16 Peserta.



- Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan bersama para Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris mengikuti rangkaian kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Secara Virtual oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI pada hari Kamis, 6 Juli 2023 di Ruang Rapat Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.



- Kegiatan Kerjasama antara Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jasa konsultan jasa posbakum
- Kegiatan Prodeo untuk 1 perkara

### **Implementasi Manajemen Resiko**

Untuk memastikan agar Sasaran Strategis tercapai, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian Sasaran Strategis. Beberapa risiko yang dapat menghambat pencapaian Sasaran strategis ini antara lain:

#### **1. Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta belum berkesinambungan antar periode Renstra:**

Untuk memitigasi risiko tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyusun rencana aksi berupa:

- a. Sosialisasi Renstra kepada pegawai;

- b. Koordinasi dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Renstra;
- c. Pelatihan pegawai untuk mendapatkan pemahaman terkait sasaran strategis organisasi.

**2. Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta belum memenuhi standar.**

Untuk memitigasi risiko diatas, dilakukan langkah-langkah rencana aksi berupa:

- a. Membuat pedoman teknis Pengadialan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang sesuai dengan aturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung.
- b. Melakukan reviu atas kinerja pelaksana di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

**3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kurang update terhadap Perkembangan Lingkungan Eksternal.**

Untuk memitigasi risiko diatas, dilakukan langkah-langkah rencana aksi antara lain:

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan informasi terbaru untuk dibandingkan dengan kebijakan yang telah ada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- b. Melakukan update dokumen perencanaan strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan kondisi terkini;
- c. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak eksternal.
- d. Pengembangan kompetensi terhadap SDM yang ada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

**4. Pengembangan kompetensi SDM belum maksimal dan menyeluruh**

Untuk memitigasi risiko diatas, dilakukan langkah-langkah rencana aksi antara lain:

- a. Merencanakan program/kegiatan ditahun mendatang untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- b. Aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI untuk dapat mengusulkan SDM Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *Focus Group Discussion* FGD.

#### **5. Ketepatan waktu penyampaian laporan output dan kinerja**

Untuk memitigasi risiko diatas dilakukan dengan cara adanya laporan bulanan untuk tiap sub bagian dari kepaniteraan dan kesekretariatan, monitoring capaian melalui komdanas, monitoring program menggunakan aplikasi bappenas, keuangan melalui SMART dan OM SPAN.

#### **6. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran dan Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Untuk memitigasi risiko diatas dilakukan dengan cara:

- a. Memonitoring capaian tingkat kinerja implementasi anggaran tersebut berdasarkan empat indikator yaitu penyerapan anggaran, pencapaian keluaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi serta efisiensi sesuai ketentuan.
- b. Melakukan revisi anggaran atas kegiatan-kegiatan yang diperkirakan tidak dapat direalisasikan;
- c. Penyelesaian pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu.
- d. Biaya perjalanan dinas luarkota dan dalam kota dapat dikurangi melalui pemanfaatan media zoom dalam melaksanakan rapat, koordinasi, FGD, pelatihan dan workshop.

#### **7. Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan**

Untuk memitigasi risiko diatas dilakukan dengan cara:

- a. Pembangunan dan pengembangan budaya kerja di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mewujudkan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) serta mengedepankan nilai-nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) yang diwujudkan dengan tata kelola administrasi yang berkualitas serta peningkatan sarana prasarana layanan Pengadilan.
- b. Untuk mempertahankan capaian atas target yang ditetapkan selama ini, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melakukan pemantauan atas penyusunan laporan output dan kinerja agar dapat disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui kegiatan pengawasan bidang dan pengawasan daerah, dilakukan sinergi secara berjenjang oleh pimpinan.

#### **8. Pengelolaan BMN yang belum efisien**

Untuk memitigasi risiko diatas dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan penghapusan BMN yang rusak berat dan tidak dapat digunakan untuk mengurangi biaya pemeliharaan;

- b. Melakukan perbaikan secara berkala BMN agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

## B. Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2023, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mendapatkan pagu anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi sebesar Rp 13.963.477.000 (Tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dan DIPA 05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebesar Rp 179.216.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Tabel 46 - Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023

No	Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
1.	<b>Badan Urusan Administrasi</b>				
	Program Dukungan Manajemen	15.958.194.000	13.963.477.000	13.382.508.779	95,84
2.	<b>Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara</b>				
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	179.216.000	179.216.000	174.695.292	97,48
<b>Jumlah</b>		<b>16.137.410.000</b>	<b>14.142.693.000</b>	<b>13.557.204.071</b>	<b>96,66</b>

Realisasi Anggaran pada Tahun 2023 mencapai Rp 13.557.204.071 (tiga belas milyar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat ribu tujuh puluh satu rupiah) atau sebesar 96,66% dari total alokasi yaitu Rp 14.142.693.000 (empat belas milyar seratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Program dukungan manajemen dan program penegakan dan pelayanan hukum dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran-sasaran startegis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023.

Tabel 47- Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa (Rp)	Sisa (%)
Program Dukungan Manajemen ▪ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	13.802.077.000	13.221.255.359	95,79	580.821.641	4,21
▪ Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung	161.400.000	161.253.420	99,91	146.580	0,09
Program Pengkakan dan Pelayanan Hukum ▪ Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	179.216.000	174.695,292	97,48	4.520.708	2,52

Tabel 48 - Efisiensi Anggaran pada masing-masing Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Realisasi %	Capaian Kinerja	Efisiensi
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	▪ Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	95,79	111,11	15,32
	▪ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	▪ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi		103,90	8,11
	▪ Indeks persepsi stakeholder yang	▪ Pengadaan Sarana dan	99,91	121,49	21,58

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Realisasi %	Capaian Kinerja	Efisiensi
	puas terhadap layanan peradilan	Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung			
<b>Rata - Rata Sasaran Strategis I</b>			<b>97,85</b>	<b>112,17</b>	<b>15,00</b>
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu</li> </ul>	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b> Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	97,48	100	2,52
<b>Rata-rata Sasaran Strategis II</b>			<b>97,48</b>	<b>100</b>	<b>2,52</b>
<b>Rata-rata Capaian Strategis I dan II</b>			<b>97,67</b>	<b>106,08</b>	<b>8,42</b>

Seluruh kegiatan pada Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” dan “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis I “Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” sebesar 112,17%, lebih tinggi dengan realisasi anggaran pada sasaran tersebut yaitu sebesar 97,85% sehingga terjadi efisiensi sebesar 15%.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis II “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” sebesar 100%, lebih tinggi dengan realisasi anggaran pada sasaran tersebut yaitu sebesar 97,48% sehingga terjadi efisiensi sebesar 2,52%.

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi sebesar Rp 13.963.477.000 (Tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang meliputi:

#### 1. Belanja Pegawai

Jumlah Belanja Pegawai tahun 2023 sebesar Rp. 9.839.997.000 (Sembilan milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan.

## 2. Belanja Barang

Jumlah Belanja Barang tahun 2023 sebesar Rp. 3.381.258.359 (Tiga milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah). Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan, jasa dan perjalanan dinas.

## 3. Belanja Modal

Jumlah Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp 161.253.420 (Seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah). Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya.

Tabel 49 - Realisasi DIPA 01 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran Rp	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1.	Belanja Pegawai	10.336.532.000	9.839.997.000	95,20	496.535.000	4,80
2.	Belanja Barang	3.465.545.000	3.381.258.359	97,57	84.286.641	2,43
3.	Belanja Modal	161.400.000	161.253.420	99,91	146.580	0,09
<b>Jumlah</b>		<b>13.963.477.000</b>	<b>13.382.508.779</b>	<b>95,84</b>	<b>580.968.221</b>	<b>4,16</b>

Sumber data: OM- SPAN Kemenkeu

DIPA 05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebesar Rp 179.216.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah), yang meliputi belanja barang pada DIPA 05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan. Berdasarkan tabel dibawah ini pada tahun 2023 penyerapan Realisasi DIPA 05 sebesar 97,48% yang digunakan untuk peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Tabel 50 - Realisasi DIPA 05 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran Rp	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1.	Belanja Barang	179.216.000	174.695,292	97,48	4.520.708	2,52
<b>Jumlah</b>		<b>179.216.000</b>	<b>174.695,292</b>	<b>97,48</b>	<b>4.520.708</b>	<b>2,52</b>

Sumber data: OM- SPAN Kemenkeu

## **Dukungan Anggaran Terhadap Kinerja**

Anggaran DIPA 01 dan DIPA 05 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

### **1. Program Dukungan Manajemen**

#### **1.1. Kegiatan:**

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi meliputi layanan umum dan layanan perkantoran. Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dan indikator berikut ini:

#### **Sasaran Strategis I “Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel”**

- Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

#### **Sasaran Strategis III “Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur teknis dilingkungan peradilan”.**

- Presentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial

#### **Sasaran Strategis IV “Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan”.**

- Presentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi.

#### **Sasaran Strategis V “Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal”.**

- Presentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti.
- Presentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan.

#### **Sasaran Strategis VI “Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset”.**

- Presentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja).

Program dan Kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA 01 BUA sebesar Rp 13.221.255.359, dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 51 - Realisasi DIPA 01 mendukung Sasaran I, III, IV, V, VI dan 7 Indikator

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran Rp	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>				
1.	Layanan Perkantoran ▪ Gaji dan Tunjangan	10.336.532.000	9.839.997.000	95,20
2.	Layanan Perkantoran ▪ Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.419.578.000	3.337.210.564	97,59
3.	Layanan Umum ▪ Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	45.967.000	44.047.795	95,82
<b>Jumlah</b>		<b>13.802.077.000</b>	<b>13.221.255.359</b>	<b>95,79</b>

### 1.2. Kegiatan:

Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung, meliputi layanan sarana internal dan layanan prasarana internal. Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dan indikator berikut ini:

**Sasaran Strategis I "Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel".**

- Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.

Program dan Kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA 01 BUA sebesar Rp 161.253.420, dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 52 - Realisasi DIPA 01 mendukung Sasaran I dan 1 Indikator

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran Rp	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1.	Layanan Sarana Internal ▪ Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi ▪ Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	5.000.000 112.500.000	4.995.000 112.360.140	99,90 99,88
2.	Layanan Prasarana Internal ▪ Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	43.900.000	43.898.280	100
<b>Jumlah</b>		<b>161.400.000</b>	<b>161.253.420</b>	<b>99,91</b>

## 2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Kegiatan:

Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara meliputi koordinasi, sosialisasi dan diseminasi, layanan bantuan hukum perseorangan dan perkara hukum perseorangan. Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dan indikator berikut ini:

### Sasaran Strategis II “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”.

- Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.

### Sasaran Strategis III “Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan”.

- Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial.

### Sasaran Strategis V “Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal”.

- Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti.
- Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan

Program dan Kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA 05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebesar Rp 161.253.420, dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 53 - Realisasi DIPA 05 mendukung Sasaran II, III, dan V dan 4 Indikator

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran Rp	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1.	<b>Belanja Barang:</b>			
	✓ Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara	38.400.000	38.084.200	99.18
	✓ Dukungan Penyelesaian Perkara	7.000.000	7.000.000	100
	✓ Sosialisasi/Bimtek Kompetensi dan Administrasi Penyelesaian Perkara	115.400.000	111.210.088	96.37
	✓ Layanan Pos Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	17.416.000	17.402.004	99.92
	✓ Perkara Peradilan TUN yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	1.000.000	999.000	99.90
	<b>Jumlah</b>	<b>179.216.000</b>	<b>174.695.292</b>	<b>97,48</b>

Tabel berikut ini menunjukkan Matrik Rincian Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2023 sesuai program dan kegiatan dan rincian belanja yang mendukung capaian masing-masing indikator sasaran strategis sesuai target kinerja yang diperjanjikan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023 dan dokumen Renstra 2020 – 2024

Tabel 54 - Realisasi Dan Presentase DIPA 01 Dan DIPA 05  
 Dalam Mendukung Capaian Sasaran Strategis 1,2, dan Sasaran Strategis Tambahan  
 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Sumber Anggaran	Pagu Rp.	Jenis Belanja	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	%			
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<b>Program:</b> Dukungan Manajemen	DIPA 01	13.802.077.000	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b> Layanan Perkantoran	10.336.532.000	9.839.997.000	95,20			
			<b>Kegiatan:</b> Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi			Layanan Perkantoran				3.419.578.000	3.337.210.564	97,59
						Layanan Umum				45.967.000	44.047.795	95,82
		2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi				<b>Layanan Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah</b>						
		3. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	<b>Program:</b> Dukungan Manajemen		161.400.000	<b>Belanja Modal</b>	5.000.000	4.995.000	99,90			
						<b>Layanan Sarana Internal</b>						
						<b>Layanan Sarana Internal</b>	112.500.000	112.360.140	99,88			
						<b>Layanan Prasarana Internal</b>	43.900.000	43.898.280	100			

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Sumber Anggaran	Pagu Rp.	Jenis Belanja	Pagu Rp	Realisasi Rp	%
			<b>Kegiatan:</b> Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung						
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	<b>Program:</b> Penegakan dan Pelayanan Hukum  <b>Kegiatan:</b> Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	<b>DIPA 05</b>	179.216.000	<b>Belanja Barang</b> ▪ Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara  ▪ Dukungan Penyelesaian Perkara  ▪ Sosialisasi/Bimtek Kompetensi dan Administrasi Penyelesaian Perkara  ▪ Layanan Pos Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara  ▪ Perkara Peradilan TUN yang diselesaikan melalui	38.400.000  7.000.000  115.400.000  17.416.000  1.000.000	38.084.200  7.000.000  111.210.088  17.402.004  999.000	99.18  100  96.37  99.92  99.90

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Sumber Anggaran	Pagu Rp.	Jenis Belanja	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	%
						pembebasan biaya perkara			
3.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	<b>Program:</b> Dukungan Manajemen  <b>Kegiatan:</b> Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	<b>DIPA 01</b>	13.802.077.000	Layanan Dukungan Manajemen Internal	13.802.077.000	13.221.255.359	95,79
			<b>Program:</b> Penegakan dan Pelayanan Hukum  <b>Kegiatan:</b> Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	<b>DIPA 05</b>	179.216.000	Belanja Barang	179.216.000	174.695.292	97,48
4.	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi	<b>Program:</b> Dukungan Manajemen	<b>DIPA 01</b>	13.802.077.000	Layanan Dukungan Manajemen Internal	13.802.077.000	13.221.255.359	95,79

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Sumber Anggaran	Pagu Rp.	Jenis Belanja	Pagu Rp	Realisasi Rp	%
			<b>Kegiatan:</b> Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi						
5.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	▪ Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	<b>Program:</b> Dukungan Manajemen  <b>Kegiatan:</b> Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	<b>DIPA 01</b>	13.802.077.000	Layanan Dukungan Manajemen Internal	13.802.077.000	13.221.255.359	95,79
			<b>Program:</b> Penegakan dan Pelayanan Hukum <b>Kegiatan:</b> Peningkatan Manajemen Peradilan	<b>DIPA 05</b>	179.216.000	Belanja Barang	179.216.000	174.695.292	97,48

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Sumber Anggaran	Pagu Rp.	Jenis Belanja	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	%
		▪ Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	Tata Usaha Negara <b>Program:</b> Dukungan Manajemen <b>Kegiatan:</b> Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	<b>DIPA 01</b>	13.802.077.000	Layanan Dukungan Manajemen Internal	13.802.077.000	13.221.255.359	95,79
			<b>Program:</b> Penegakan dan Pelayanan Hukum  <b>Kegiatan:</b> Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	<b>DIPA 05</b>	179.216.000	Belanja Barang	179.216.000	174.695.292	97,48
6.	Peningkatan transparansi pengelolaan sumber daya manusia,	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	<b>Program:</b> Dukungan Manajemen  <b>Kegiatan:</b>	<b>DIPA 01</b>	13.802.077.000	Layanan Dukungan Manajemen Internal	13.802.077.000	13.221.255.359	95,79

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Sumber Anggaran	Pagu Rp.	Jenis Belanja	Pagu Rp	Realisasi Rp	%
	keuangan dan aset		Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi						

*Tabel 55 - Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Per Program untuk DIPA 01 dan DIPA 05 Tahun 2020-2023*

No	Jenis Program/Kegiatan	2020	2021	2022	2023
1.	Program Dukungan Manajemen/ Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	98,63%	94,28%	93,83%	95,79%
2.	Program Dukungan Manajemen/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung	99,97%	99,99%	100,00%	99,91%
3.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum/ Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	94,23%	88,48%	91,80%	97,48%

Dari perincian tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk anggaran DIPA 01 maupun anggaran DIPA 05 untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 nilai realisasi anggarannya dapat dikatakan baik dikarenakan presentase yang didapatkan adalah melebihi dari angka 90%. Hal ini dapat terwujud dikarenakan pengoptimalan anggaran yang tidak terpakai segera di revisi untuk anggaran yang dapat terserap.

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2023 yang diolah berdasarkan analisa pengukuran capaian indikator kinerja, bahwa pada tahun 2023 semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi kepada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumber daya manusia, maka kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk program kerja tahun 2023 dipandang baik walaupun belum sempurna. Usaha perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian Visi, Misi Tujuan dan Sasaran diantaranya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada hasil yang akan di dapat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023 ini menyajikan Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2023 yang dituangkan dalam 2 (dua) Sasaran Strategis dengan menggunakan alat ukur 4 (empat) Indikator Kinerja. Seluruh sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berhasil dicapai oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari 4 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan semua berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2023 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun ketiga dari Renstra Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2020-2024 yang di telah dilakukan reuiu yang kedua. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2023 dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain: adanya kebijakan peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023, telah direalisasikan anggaran dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi sebesar Rp 13.382.508.779 (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sebesar 95,84% dan anggaran dari DIPA 05 Badan Peradilan Tata Usaha Negara sebesar Rp 174.695.292 (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) sebesar 97,48 %.

Capaian kinerja pada tahun 2023 secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebesar 106,08%. Capaian kinerja tahun 2023 ini mengalami kenaikan kinerja sebesar 4,59% dari capaian kinerja tahun 2022. Hal ini dikarenakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakarta telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga berupaya meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Pengadilan. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Keterbukaan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan. Selain itu banyaknya inovasi dalam menunjang pelayanan dan pencapaian kinerja terus dikembangkan.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2023 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus sebagai tolok ukur yang akan dihadapi tahun berikutnya, sehingga diharapkan mampu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi menjadi lebih baik. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2023 telah memenuhi target sesuai rencana kinerja tahun 2023.

## **B. Saran**

Dari hasil capaian kinerja yang diukur dalam Laporan Kinerja ini, maka berikut ini merupakan saran yang direkomendasikan:

1. Agar capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023 dijadikan pijakan untuk menentukan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan guna mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
2. Agar dilakukan penyesuaian IKU berdasarkan klasifikasi perkara banding dan perkara gugatan terhadap indikator kinerja berikut ini:
  - a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
  - b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi; dan
  - c. Presentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak/Pengadilan Pengaju tepat waktu.
3. Kebijakan yang telah diambil pada tahun 2023 yang secara nyata dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja dan pelayanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta supaya dipertahankan.

4. Peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta lebih dapat ditingkatkan lagi agar seluruh sumber daya saling bersinergi, saling mengisi, terencana, sistematis dan terprogram secara komprehensif.
5. Penguatan produktivitas dan administrasi penyelesaian perkara.
6. Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.
7. Penguatan pengawasan internal dan eksternal.
8. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
9. Penambahan Sumber Daya Manusia yang ahli dan sesuai dengan kompetensi dalam nomenklatur jabatan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 187/SEK/SK/IV/2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
10. Penambahan alokasi anggaran untuk peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kinerja.

## **LAMPIRAN**

- Lampiran 1 - Indikator Kinerja Utama
- Lampiran 2 - Matrik Renstra 2020 – 2024
- Lampiran 3 - Rencana Kinerja Tahun 2023
- Lampiran 4 - Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Lampiran 5 – Pengukuran Kinerja Tahun 2023
- Lampiran 6 - Capaian Kinerja Berkala
- Lampiran 7 - Checklist Reviu
- Lampiran 8 - SK Pembentukan Tim Penyusun LKJIP 2023
- Lampiran 9 - SK Penetapan Dokumen LKJIP 2023

**LAMPIRAN 1**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
TAHUN 2023**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.</li> <li>• SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat <b>3 (tiga)</b></li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	90%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
			<p><b>bulan</b> dan pada pengadilan tk pertama (gugatan) paling lambat <b>5 (lima) bulan</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>			
		b. Presentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p><b>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</b>  <math>\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> <li>Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	35%
		c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	<p><b>Indeks Persepsi Kepuasan <i>Stakeholder</i></b></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus <math>\geq 80</math>.</li> </ul>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan  Laporan Tahunan	80%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Stakeholder</i> adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.</li> </ul>			
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.	$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan yang dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.</li> <li>• SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan.</li> <li>• Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan  Laporan Tahunan	100%

Jakarta, 25 Januari 2023

Ketua

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.  
NIP. 19580610 198503 1 001



**LAMPIRAN 2**  
**MATRIK RENSTRA 2020-2024**

**REVIU Ke-2 MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

- Instansi : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung  
 Misi : 1. Meningkatkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan (*yusticial balance*)  
 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Tata Usaha Negara  
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara  
 4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara

No	Tujuan		Sasaran		Target 20 th	Target					STRATEGI						
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)		
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	1. Terwujudnya pengadilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>Perkara Banding</li> <li>Perkara Gugatan</li> </ul>	100%	100%	90%	90%	90%		Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan perkantoran Operasional dan pemeliharaan kantor</li> </ul>	1	15.818.091.000		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi:</li> <li>Perkara Banding</li> <li>Perkara Gugatan</li> </ul>	100%	50%	35%	35%		Program Dukungan Manajemen				Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan perkantoran Operasional dan pemeliharaan kantor</li> </ul>	1	15.818.091.000
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan</li> </ul>	91%	80	80	80	80	91				Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan operasional kantor</li> </ul>	12 bulan
	Terwujudnya kepercayaan publik atas	Terwujudnya proses peradilan yang efektif	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para</li> </ul>	100%	100%	100%	100%	100%		Program penegakan dan	Peningkatan manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi</li> <li>Sosialisasi dan Diseminasi</li> </ul>	3 Keg 8 orang	44.000.000 36.300.000 1.530.000		

No	Tujuan		Rencana		Target 20 th	Target					STRATEGI				
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
	layanan Pengadilan	dan efisien berbasis TI		<p>pihak/pengadilan pengaju tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase salinan putusan perkara <b>Banding</b> yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu</li> <li>• Persentase salinan putusan perkara <b>Gugatan</b> yang dikirim pihak/pengadilan pengaju tepat waktu</li> </ul>							pelayanan hukum		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkara hukum Perseorangan</li> <li>- Layanan Bantuan Hukum Perseorangan</li> </ul>	3 perkara 48 orang	17.400.000
3.	Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima		1. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparaturnya teknis di lingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial	100%	80%	85%	90%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan pengawasan</li> </ul>		34.000.000
			2. Meningkatnya kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	• Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi.	90%	80%	80%	85%	90%	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi</li> <li>- Sosialisasi</li> </ul>		24.000.000 36.300.000
			3. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja	• Persentase pengaduan yang	85%	80%	80%	85%	85%	85%	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan pengawasan</li> </ul>		34.000.000

No	Tujuan		Sasaran		Target 20 th	Target					STRATEGI				
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
			aparapradadilansecaraoptimal	dapatditindaklanjuti											
				• Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		70%	75%	85%	85%	85%	Program penegakan dan pelayanan hukum	kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama  Peningkatan manajemen peradilan tata usaha negara	Koordinasi	2 Keg	24.000.000
			4 Peningkatan transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan aset	Peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi sekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama			DIPA-01

Jakarta, 20 Desember 2023

Ketua



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.  
NIR. 19580610 198503 1 001

**LAMPIRAN 3**  
**RENCANA KINERJA**  
**TAHUN 2023**

**REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	35%
		c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tambahan	Target
1.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	100%
2.	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi	90%
3.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85%
4.	Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	100%

  
 Jakarta, 20 Desember 2023  
 Ketua  
 H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.  
 NIP. 19580610 198503 1 001

**LAMPIRAN 4**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**TAHUN 2023**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.**  
Jabatan : **Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H., M.H.**  
Jabatan : **Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan  
Peradilan Tata Usaha Negara



Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H., M.H.  
NIP. 19690508198803 2 002

Jakarta, 25 Januari 2023  
Pihak Pertama,  
Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Jakarta



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.  
NIP. 19580610198503 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi. c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	90% 35% 80%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100%

**Kegiatan**

1. Program Dukungan Manajemen
2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

**Anggaran**

- Rp. 15.958.194.000  
Rp. 53.400.000  
Rp. 179.216.000

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara



Hj. LULIK CAHYA NINGRUM, S.H., M.H.  
NIP. 19630508 198803 2 002

Jakarta, 25 Januari 2023  
Pihak Pertama,  
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.  
NIP. 19580610 198503 1 001

**LAMPIRAN 5**  
**PENGUKURAN KINERJA**  
**TAHUN 2023**

**PENGUKURAN KINERJA KINERJA TAHUN 2023**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	100%	111,11%
		2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	35%	36,36%	103,90%
		3. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80	97,19	121,49%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I</b>					<b>112,17%</b>
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis II</b>					<b>100%</b>
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Startegis I dan II</b>					<b>106,08%</b>

**CAPAIAN KINERJA LAINNYA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Lain	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	30	37	123,33%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis III</b>					<b>123,33%</b>
2.	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi	30	32	106,67%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis IV</b>					<b>106,67%</b>
3.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%	100%	117,65%
		2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85%	100%	117,65%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis V</b>					<b>117,65%</b>
4.	Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis VI</b>					<b>100%</b>
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Lainnya</b>					<b>111,91%</b>

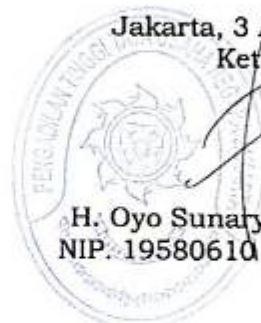
**LAMPIRAN 6**  
**CAPAIAN KINERJA BERKALA**

**PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN I  
TAHUN 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	100%	111,111%
		2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	-	-	-
		3. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80	96,53	120,66%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I</b>					<b>115,89%</b>
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis II</b>					<b>100%</b>
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Startegis I dan II</b>					<b>107,94%</b>

Jakarta, 3 April 2023

Ketua



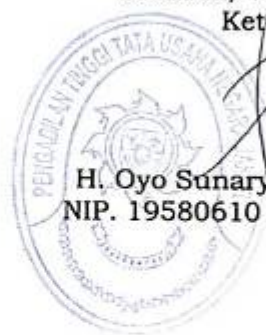
H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.  
NIP. 19580610 198503 1 001

**PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN II**

**TAHUN 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	100%	111,11%
		2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	35%	38%	109,89
		3. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80	98,08	122,60%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I</b>					<b>114,09%</b>
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis II</b>					<b>100%</b>
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Startegis I dan II</b>					<b>107,05%</b>

Jakarta, 4 Juli 2023  
Ketua



H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.  
NIP. 19580610 198503 1 001

**PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN III  
TAHUN 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	100%	111,11%
		2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	-	-	-
		3. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80	97,63	122,04%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I</b>					<b>116,57%</b>
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis II</b>					<b>100%</b>
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Startegis I dan II</b>					<b>108,29%</b>

Jakarta, 3 Oktober 2023

Ketua



H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.  
NIP. 19580610 198503 1 001

**PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV  
TAHUN 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	100%	111,11%
		2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	35%	35%	100%
		3. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80	97,19	121,49%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I</b>					<b>110,87%</b>
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis II</b>					<b>100%</b>
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Startegis I dan II</b>					<b>105,43%</b>

Jakarta, 3 Januari 2024  
Ketua



H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.  
NIP. 19580610 198503 1 001

**LAMPIRAN 7**  
**CHECKLIST REVIU**

### CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan	Check List
I.	Format	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP. ✓</li> <li>2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja. ✓</li> <li>3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai. ✓</li> <li>4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan. ✓</li> <li>5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan. ✓</li> <li>6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan. ✓</li> </ol>
II.	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu. ✓</li> <li>2. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung dengan data yang memadai. ✓</li> <li>3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj. ✓</li> <li>4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja. ✓</li> <li>5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya. ✓</li> <li>6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait. ✓</li> <li>7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya. ✓</li> </ol>
III.	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja. ✓</li> <li>2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis. ✓</li> </ol>

No	Pernyataan	Check List
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	✓
	4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
	5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	✓
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	✓
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	✓
	9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	✓
	10. IKU dan IK telah SMART.	✓

**LAMPIRAN 8**  
**SK PEMBENTUKAN TIM**  
**PENYUSUN LKJIP 2023**



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

KEPUTUSAN  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
NOMOR : 1222 /KPT.TUN.W2-TUN/KP3.4.1/XII/2023

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU SAKIP  
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melakukan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Reviu SAKIP.

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang.....

3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
12. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU SAKIP PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Reviu SAKIP Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua.....

- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2024;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Desember 2023

Ketua  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



H. OYO SUNARYO, S.H.M.H.  
NIP. 19580610 198503 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung di Jakarta
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan di Tempat
4. Arsip

Lampiran I Keputusan  
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 1222/KPT.TUN.W2-TUN/KP3.4.1/XII/2023  
Tanggal : 13 Desember 2023

**TIM PENYUSUN REVIU SAKIP  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>:</b>	<b>NAMA</b>
1.	Pembina	:	H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
2.	Penanggung Jawab	:	Dr. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.
3.	Pengarah	:	YUSRAN IBERAHIM, S.H.
4.	Koordinator	:	Drs. MUHIDIN, M.H.
5.	Sekretaris	:	ONO HARYONO, S.E.
6.	Anggota	:	1. WAHYU SUPRAPTONO, S.IP 2. JARWO LIYANTO, S.H.,M.H. 3. DARUL NAPIS, S.H 4. APEY TITI KUNDARTI, S.H 5. ELLY SETIO WARDANI, S.H 6. PATTIE OKTAVIATIE, S.H 7. AKHMAD IBNU ROMDON, S.E. 9. IIS YULITA TRISNAWATI K, S.E. 10. NURUL FADHILAH, S.H. 11. GURNITA NING KUSUMAWATI, S.H
7.	Sekretariat	:	1. NITUYU MENDROFA, S.H. 2. FIRMANSYAH, S.H 3. DWI HENNY FEBRIATI, S.H 4. MEYKE HERBITA SARI, S.M. 5. SARI MEILISNA, Amd 6. KARUNIA DWI PUTRI PARAMITA, A.Md. 7. SANTI GUSTIANI, S.E.

Ketua  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



H. OYO SUNARYO, SH.MH  
NIP. 19580610 198503 1 001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

KEPUTUSAN  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
NOMOR : 1322 /KPT.TUN.W2-TUN/KP3.4.1/XII/2023

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP  
(IKU 2024, LKjIP 2023, PKT 2024,  
RKT 2024, RKT 2025 DAN RENCANA AKSI 2024)  
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melakukan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Mengingat

1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang.....

3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawah;
11. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP (IKU 2024, LKjIP 2023, PKT 2024, RKT 2024, RKT 2025 DAN RENCANA AKSI 2024) PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
- Pertama** : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Sakip (Iku 2024, LKjIP 2023, PKT 2024, RKT 2024, RKT 2025 Dan Rencana Aksi 2024) Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2024;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 Desember 2023

Ketua  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



H. OYO SUNARYO, S.H.M.H.  
NIP. 19580610 198503 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung di Jakarta
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan di Tempat
4. Arsip

Lampiran I Keputusan  
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 1324/KPT.TUN.W2-TUN/KP3.4.1/XII/2023  
Tanggal : 20 Desember 2023

TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP  
(IKU 2024, LKjIP 2023, PKT 2024,  
RKT 2024, RKT 2025 DAN RENCANA AKSI 2024)  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NO.	JABATAN	:	NAMA
1.	Pembina	:	H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
2.	Penanggung Jawab	:	Dr. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.
3.	Pengarah	:	YUSRAN IBERAHIM, S.H.
4.	Koordinator	:	Drs. MUHIDIN, M.H.
5.	Sekretaris	:	ONO HARYONO, S.E.
6.	Anggota	:	1. WAHYU SUPRAPTONO, S.IP 2. JARWO LIYANTO, S.H.,M.H. 3. DARUL NAPIS, S.H 4. APEY TITI KUNDARTI, S.H 5. ELLY SETIO WARDANI, S.H 6. PATTIE OKTAVIATIE, S.H 7. AKHMAD IBNU ROMDON, S.E. 9. IIS YULITA TRISNAWATI K, S.E. 10. NURUL FADHILAH, S.H. 11. GURNITA NING KUSUMAWATI, S.H
7.	Sekretariat	:	1. NITUYU MENDROFA, S.H. 2. FIRMANSYAH, S.H 3. DWI HENNY FEBRIATI, S.H 4. MEYKE HERBITA SARI, S.M. 5. SARI MEILISNA, Amd 6. KARUNIA DWI PUTRI PARAMITA, A.Md. 7. SANTI GUSTIANI, S.E.

Ketua  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



H. OYO SUNARYO, SH.MH  
NIP. 19580610 198503 1 001

**LAMPIRAN 9**  
**SK PENETAPAN DOKUMEN**  
**LKJIP 2023**



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

KEPUTUSAN  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
NOMOR : 152 /KPT.TUN.W2-TUN/KP3.4.1/1/2024

PENETAPAN DOKUMEN SAKIP  
(IKU 2024, LKjIP 2023, PKT 2024,  
RKT 2024, RKT 2025 DAN RENCANA AKSI 2024)  
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
- Menimbang : a. Bahwa Dokumen SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, khususnya bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;  
b. Bahwa dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka perlu adanya penyesuaian kegiatan dan strategi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;  
c. Bahwa berdasarkan hasil penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2024, maka perlu penetapan Dokumen SAKIP Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;  
5. Peraturan.....

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SAKIP (IKU 2024, LKjIP 2023, PKT 2024, RKT 2024, RKT 2025 DAN RENCANA AKSI 2024) PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**
- Kesatu** : Menetapkan Dokumen SAKIP (IKU 2024, LKjIP 2023, PKT 2024, RKT 2024, RKT 2025 dan Rencana Aksi 2024), sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum pada lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 17 Januari 2024



H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.  
NIP. 19580610 198503 1001



☎ 021-31966163

🌐 [pttun.jakarta.go.id](http://pttun.jakarta.go.id)

📍 Jl. Cikini Raya No. 117 Menteng Jakarta Pusat

📷 [pttun.jakarta.117](https://www.instagram.com/pttun.jakarta.117)

✉ [pttun.jakarta@gmail.com](mailto:pttun.jakarta@gmail.com)